

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJP) TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PENDIDIKAN, EEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KARUPATEN BANJARNEGARA





KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atas pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2022.

Adapun realisasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berupa indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang merupakan tolok ukur pencapaian kinerja sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2022. Ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sasaran strategis ini diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu:

- 1. Meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu;
- 2. Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu;
- 3. Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4. Meningkatnya layanan pendidikan non formal yang merata, terjangkau dan bermutu;
- 5. Meningkatnya perolehan kejuaraan ajang kompetisi pelajar;
- 6. Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan;
- 7. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik;
- 8. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan 7 program yang meliputi 6 program utama dan 1





program pendukung. Program utama, merupakan program-program teknis yang mencerminkan ciri khas Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah lainnya. Sedangkan program pendukung, merupakan program-program rutin dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sehingga dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini guna mengukur kinerjanya menggunakan program utama sebagai salah satu tolok ukur kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sasaran strategis.

Dinas Pendidikan, Kepemudan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara telah melalui berbagai dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang dihadapi, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Untuk itu dalam LKjIP ini segenap capaian kinerja disajikan secara lebih rinci yang mencakup keberhasilan maupun hambatan selama dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara menyadari bahwa kredibilitas instansi tidak hanya ditentukan dari pencapaian-pencapaian yang disajikan dalam laporan akuntabilitas ini. Namun kedepan akan terus berbenah untuk dapat mencapai kualitas yang lebih baik.

Sebagai bentuk syukur atas pencapaian tersebut, segenap jajaran pimpinan dan pelaksana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara terus berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk perbaikan kinerja sekaligus berusaha keras dalam peningkatan kualitas dan layanan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara pada khususnya.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berharap dapat memberikan gambaran objektif





tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga pada Tahun 2022. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pendidikan di Kabupaten Banjarnegara di periode waktu yang akan datang.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyadari bahwa tantangan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan masih memerlukan cukup banyak perhatian, apalagi di era new normal, setelah di terpa oleh adanya pandemi covid-19 dimana proses belajar mengajar di masing-masing satuan pendidikan harus disesuaikan dari proses kegiatan belajar mengajar secara daring/online, secara bertahap beralih menjadi proses pembelajaran secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan yang lebih ketat, melalui program vaksinasi terhadap seluruh aparatur di masing-masing Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, dan mencakup pula seluruh peserta didik. Selain hal itu, pemerataan sumber daya manusia di masing-masing satuan pendidikan juga belum merata, melihat topografi dan letak geografis di masing-masing satuan pendidikan yang ada.

Beberapa keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya asset serta kondisi geografis yang cukup variatif, tidak menjadikan hal tersebut sebagai kendala semata namun merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi serta dicarikan upaya pemecahannya agar target tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

Kami berharap melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 ini kami dapat menguraikan secara runtut keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang





telah kami capai selama ini khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada unit kerja kami.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan apabila ada hal-hal yang kurang sempurna, saran kritik tetap terbuka demi perbaikan di waktu yang akan datang.



DAFTAR ISI

<u> </u>				i iv
				V
				vi
Daftar Ga	mba	ır		vii
BAB I	Per	ndal	huluan	1
	A.	Ga	ımbaran Umum	1
	В.	Da	ısar Hukum	4
	C.	Stı	ruktur Organisasi	4
	D.	Isu	ı Strategis Organisasi	6
BAB II	Per	enc	anaan Kinerja	8
	A.	Pe	rencanaan Strategis	8
	В.	Pe	rjanjian Kinerja	15
BAB III	Akı	unta	abilitas Kinerja	21
	A.	Ca	paian Kinerja Organisasi	23
		1.	Sasaran 1	24
		2.	Sasaran 2	30
		3.	Sasaran 3	43
		4.	Sasaran 4	46
		5.	Sasaran 5	52
		6.	Sasaran 6	57
		7.	Sasaran 7	59
		8.	Sasaran 8	64
		9.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
		10	. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan	
			atau Kegagalan	70
	В.	Re	alisasi Anggaran	70
		1.	Struktur Belanja	70
		2.	Realisasi Belanja	73
BAB IV	Per		ıp	82



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	4
Grafik 2	Sebaran Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	26
Grafik 3	Sebaran APS 7 – 12 Tahun	32
Grafik 4	Sebaran APS 13 – 15 Tahun	34
Grafik 5	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah	39
Grafik 6	Capaian Angka Harapan Lama Sekolah	40
Grafik 7	Sebaran ATS Tahun 2022	49
Grafik 8	Realisasi Komponen Manajemen Kinerja	66
Grafik 9	Struktur Belanja Tahun Anggaran 2022	72
Grafik 10	Proporsi Belanja Langsung Berdasarkan Program	
	Penunjang dan Utama Penunjang Sasaran	73
Grafik 11	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Utama	
	Penunjang Sasaran	74
Grafik 10	Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Berasarkan	
	Sasaran Strategis	83





DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Kinerja Sasaran Pertama	16
Tabel 2	Target Kinerja Sasaran Kedua	17
Tabel 3	Target Kinerja Sasaran Ketiga	17
Tabel 4	Target Kinerja Sasaran Keempat	18
Tabel 5	Target Kinerja Sasaran Kelima	18
Tabel 6	Target Kinerja Sasaran Keenam	19
Tabel 7	Target Kinerja Sasaran Ketujuh	20
Tabel 8	Target Kinerja Sasaran Kedelapan	20
Tabel 9	Rekapitulasi Ketercapaian Indikator per Sasaran	21
Tabel 10	Realisasi Ketercapaian Sasaran 1	25
Tabel 11	Realisasi Ketercapaian Sasaran 2	30
Tabel 12	Realisasi Ketercapaian Sasaran 3	44
Tabel 13	Realisasi Ketercapaian Sasaran 4	47
Tabel 14	Realisasi Ketercapaian Sasaran 5	53
Tabel 15	Realisasi Ketercapaian Sasaran 6	57
Tabel 16	Realisasi Ketercapaian Sasaran 7	60
Tabel 17	Realisasi SKM per Unsur Pelayanan	63
Tabel 18	Realisasi Ketercapaian Sasaran 8	65
Tabel 19	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
Tabel 20	Proporsi Anggaran Tahun 2022	69
Tabel 21	Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Utama Penunjang	
	Sasaran Tahun 2022	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi Dindikpora Kab. Banjarnegara	6
Gambar 2	Proses Vaksinasi Covid-19 di jenjang Sekolah Dasar	37
Gambar 3	Akses ke sekolah yang kurang memadai	38
Gambar 4	Focus Group Discussion (FGD) Strategi Peningkatan Angka	
	Partisipasi Sekolah	51
Gambar 5	Penyerahan Trophy Kejuaraan Cabang Olahraga Panahan	
	Putri POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah	55
Gambar 6	Pelaksanaan Gebyar Profil Pendidikan "Dindikpora	
	Awards"	56





BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas dan Pendidikan. Kepemudaan Olahraga Kabupaten Banjarnegara selau unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan peningkatan dan pembenahan kinerja di tiap tahunnya. Peningkatan dan pembenahan kineria diharapkan meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional.

Adapun peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang lebih meningkat kualitasnya merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang







tertuang dalam pasal 28C yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar di masing-masing satuan pendidikan di Tahun 2022 praktis terkendala akibat adanya pandemi Covid-19. Perlahan tapi pasti, tahun 2022 bertahap dilaksanakan proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, program vaksinasi di seluruh satuan pendidikan, baik itu untuk Pendidik / Tenaga Kependidikan, serta untuk peserta didik yang ada.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, bahwa salah satu diantaranya adalah penetapan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Tugas pokok Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dan program kerja bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
- 2. Pelaksanaan kooordinasi intern dan antar unit kerja terkait di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga;
- 3. Perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga;





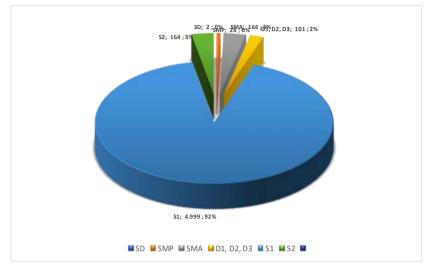
- 4. Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan atau usaha di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga;
- Penelitian, pengembangan dan pengawasan di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga;
- 6. Pemberian rekomendasi perizinan di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga;
- 7. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan serta pengidentifikasian di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga;
- 8. Penginventarisasian permasalahan ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga;
- 9. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga;
- 10. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
- 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Sumber Daya Aparatur (personil) di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara secara umum terlihat pada grafik berikut:





Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Sumber: Dindikpora Kabupaten Banjarnegara

B. Dasar Hukum

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

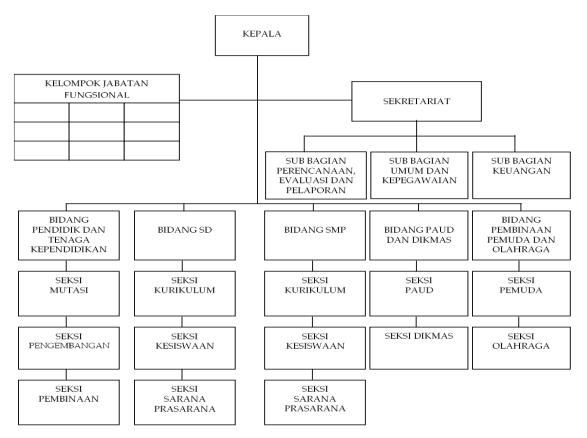
C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut :





Gambar 1 Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara



Susunan Perangkat Daerah Dinas, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara meliputi :

- 1. Sekretariat;
- 2. Bidang Sekolah Dasar;
- 3. Bidang Sekolah Menengah Pertama;
- 4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan;
- 5. Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- 6. Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.





D. Isu Strategis Organisasi

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan yang lebih baik, perlu adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan pendidikan, baik di tingkat sekolah/madrasah, maupun di tingkat Kabupaten. Manajemen pelayanan pendidikan berorientasi pada upaya peningkatan layanan pendidikan yang lebih baik kepada pengguna layanan (client) dengan menerapkan prinsipprinsip tata layanan yang baik (good governance).

Dengan dasar itu, maka penyelenggaraan layanan pendidikan dilaksanakan perlu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Penyelenggaraan layanan pendidikan yang transparan dan akuntabel ini harus terjadi baik di tingkat lembaga/institusi/satuan penyelenggara pendidikan, yaitu di sekolah atau lembaga pendidikan, maupun di tingkat pengelola layanan pendidikan yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

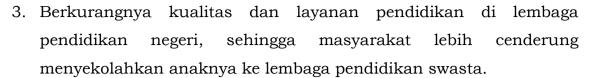
Disamping penyelenggaraan layanan pendidikan secara transparan dan akuntabel tersebut, pelayanan yang responsif (tanggap) terhadap kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan juga perlu dioptimalkan dengan tidak membedakan perlakuan antar kelompok, berarti menerapkan prinsip kebersamaan. Dan juga perlu adanya fasilitasi dan pemberian kesempatan yang cukup bagi terciptanya partisipasi semua pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan tingkat layanannya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya, ada beberapa isu strategis (*strategic issued*) yang dihadapi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dilihat dalam beberapa aspek sebagai berikut :

- 1. Masih tingginya anak tidak sekolah (ATS) yang tersebar di masingmasing kecamatan;
- 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan;







- 4. Sarana prasarana pendidikan yang belum terpenuhi secara menyeluruh, merata dan belum sesuai standar;
- 5. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum seimbang;
- 6. Rendahnya minat guru untuk menjadi Kepala Sekolah, terutama di jenjang Sekolah Dasar, dikarenakan tugas dan tanggung jawab yang semakin berat, tidak seimbang dengan tunjangan Kepala Sekolah yang diterimakan.
- 7. Belum meratanya kesempatan pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat Banjarnegara yang beragam berkontribusi dalam pencapaian angka partisipasi sekolah di Kabupaten Banjarnegara. Ada yang mudah mengakses pendidikan, sebaliknya ada pula yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan disebabkan berbagai kendala yang dihadapinya, terlebih-lebih dikaitkan dengan pemerataan mutu dan kualitasnya.
- 8. Belum meratanya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensinya;
- 9. Belum meratanya penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan;
- 10. Belum optimalnya peran pendidikan non formal di masyarakat;
- 11. Kualitas layanan dan akses pendidikan masih perlu ditingkatkan
- 12. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah menunjukkan belum optimalnya kualitas dan akses layanan pendidikan.
- 13. Belum optimalnya sarana prasarana dan pengembangan pembibitan atlet olahraga;
- 14. Lunturnya nilai-nilai sosial dan rasa nasionalisme pemuda.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 s.d. 2022 merupakan bagian integrral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan merupakan landasan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Perencanaan kinerja (performance planning) merupakan suatu penting bagi terselenggaranya manajemen (performance management) yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara telah menyusun dokumen perencanaan yang relevan sebagai operasional tindak lanjut dari perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan sebagaimana ditetapkan dalam Olahraga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, dalam penyusunannya telah mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah "BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA", adapun misinya adalah (1) Mewujudkan tata kehidupan





masvarakat vang tertib. aman, damai dan demokratis; (2)Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik; (3) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan; (4) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional (5) Mewujudkan kemartabatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan cakupan pemenuhan hak dasar.

Dari lima misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan, kepemudaan dan olahraga terdapat pada misi ke-satu dan ke-lima. Dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas pada sektor pendidikan yang tertuang dalam misi ke-lima, sedangkan tujuan pada sektor kepemudaan dan olahraga yang tertuang dalam misi ke-satu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi.

Dari tujuan tersebut dijabarkan pada sasaran yang mengerucut pada pembangunan sektor pendidikan, yaitu meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan pembangunan sektor kepemudaan olahraga yaitu meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.

Adapun prioritas pembangunan pemerintah daerah pada sektor pendidikan antara lain adalah : peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan pendidikan nonformal yang merata dan bermutu. Sedangkan pada sektor kepemudaan dan olahraga menitikberatkan pada penguatan karakter pemuda yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan pemuda pelopor.





Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022, pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di Banjarnegara ditempuh melalui program-program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Utama

- 1.1. Program Pengelolaan Pendidikan
 - 1.1.1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - 1.1.1.1. Penambahan Ruang Kelas Baru
 - 1.1.1.2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - 1.1.1.3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
 - 1.1.1.4. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - 1.1.1.5. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - 1.1.1.6. Pengadaan Mebel Sekolah
 - 1.1.1.7. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
 - 1.1.1.8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - 1.1.1.9. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - 1.1.1.10.Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
 - 1.1.1.11.Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - 1.1.1.12.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar





- 1.1.1.13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 1.1.1.14.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 1.1.2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 1.1.2.1. Penambahan Ruang Kelas Baru
 - 1.1.2.2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - 1.1.2.3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - 1.1.2.4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
 - 1.1.2.5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - 1.1.2.6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
 - 1.1.2.7. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - 1.1.2.8. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - 1.1.2.9. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - 1.1.2.10. Perlengkapan Belajar Peserta Didik
 - 1.1.2.11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - 1.1.2.12.Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - 1.1.2.13. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 1.1.2.14.Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - 1.1.2.15. Pengembangan Karir Pendidik dan TenagaKependidikan pada Satuan PendidikanSekolah Menengah Pertama





- 1.1.2.16.Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 1.1.2.17.Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 1.1.2.18.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 1.1.3. Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
 - 1.1.3.1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - 1.1.3.2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - 1.1.3.3. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - 1.1.3.4. Pengadaan Mebel PAUD
 - 1.1.3.5. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
 - 1.1.3.6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - 1.1.3.7. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - 1.1.3.8. Pengembangan Karir Pendidik dan TenagaKependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - 1.1.3.9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 1.1.4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - 1.1.4.1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
 - 1.1.4.2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 1.2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 1.2.1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan





- 1.2.1.1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 1.2.1.2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Keksetaraan
- 1.3. Program Pengembangan Kurikulum
 - 1.3.1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - 1.3.1.1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - 1.3.1.2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - 1.3.1.3. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- 1.4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - 1.4.1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - 1.4.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi danPenyelenggaraan Peningkatan KapasitasDaya Saing Pemuda Pelopor
 - 1.4.1.2. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
 - 1.4.2. Pemberdayaan dan Pengembangan OrganisasiKepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4.2.1. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
- 1.5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan





- 1.5.1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.5.1.1. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- 1.5.2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - 1.5.2.1. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
- 1.5.3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga1.5.3.1. Standardisasi Organisasi Keolahragaan
- 1.6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - 1.6.1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - 1.6.1.1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
- 2. Program Pendukung
 - 2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.1.2.1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2.1.2.2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai





- 2.1.2.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2.1.2.4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2.1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
 Penerangan Bangunan Kantor
 - 2.1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
 - 2.1.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 2.1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.1.4.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2.1.5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 2.1.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Perjanjian Kinerja

Berbagai program dan kegiatan yang ditargetkan kinerjanya di tahun 2022, dilaksanakan untuk mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022. Dengan tercapainya target kinerja sasaran tersebut, diharapkan akan mendorong





akselerasi/percepatan terwujudnya tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 akan dicapai melalui sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

<u>Sasaran pertama</u>, yaitu: "Meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu", dicapai melalui *strategi*: Fasilitasi penyelenggaraan PAUD baik formal maupun nonformal. *Arah kebijakan* strategi tersebut adalah penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD. Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran pertama sebagaimana tabel 1.

Tabel 1 Target Kinerja Sasaran Pertama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan	APS 5-6 tahun	80,00%
bermutu	% TK terakreditasi	15,00%

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

<u>Sasaran kedua</u>, "Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu" dicapai melalui *strategi*: (1) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar; (2) Fasilitasi penyelenggaran KBM pendidikan dasar; (3) Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan; (4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan. *Arah kebijakan* dari masing-masing strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi SPM dan SNP;

Strategi 2 : Penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan bagi siswa;

Strategi 3: Penerapan metodologi pembelajaran secara terpadu.

Strategi 4 : Optimalisasi peran komite sekolah





Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran kedua sebagaimana tabel 2.

Tabel 2 Target Kinerja Sasaran Kedua

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu	APS 7-12 tahun	88,50%
	APS 13-15 tahun	77,50%
	% SD Terakreditasi A	18,00%
	% SMP Terakreditasi A	35,00%

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

<u>Sasaran ketiga</u>, "Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan", akan dicapai melalui *strategi* peningkatan kapasitas dan kapabilitas pendidik dan tenaga kependidikan. *Arah kebijakan* dari masing-masing strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan;

Strategi 2 : Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat teknis maupun fungsional;

Strategi 3: Peningkatan perbaikan distribusi guru.

Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran ketiga sebagaimana tabel 3.

Tabel 3 Target Kinerja Sasaran Ketiga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	% guru tersertifikasi	95,00%

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

<u>Sasaran keempat</u>, "Meningkatnya layanan pendidikan non formal yang merata, terjangkau dan bermutu", dicapai melalui *strategi* peningkatan





pendidikan nonformal yang merata dan bermutu, dengan *arah kebijakan* dari strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan lembaga pendidikan nonformal
- b. Mengarahkan pendidikan nonformal agar dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- c. Mengembangkan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan masyarakat Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran keempat sebagaimana tabel 4.

Tabel 4 Target Kinerja Sasaran Keempat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya layanan pendidikan non formal yang merata, terjangkau dan bermutu	% Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan non formal	18,0%
	% PKBM Terakreditasi	55,0%

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

<u>Sasaran kelima</u>, "Meningkatnya perolehan kejuaraan ajang kompetisi pelajar", dicapai melalui *strategi* (1) Pemenuhan sarana dan prasarana olahraga; (2) Pembibitan atlet sejak usia dini. *Arah kebijakan* dari masing-masing strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Penyediaan sarana dan prasarana olahraga;

Strategi 2 : Penyediaan wadah pembibitan atlet.

Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran kelima sebagaimana tabel 5.

Tabel 5 Target Kinerja Sasaran Kelima

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya perolehan kejuaraan ajang kompetisi pelajar	% Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi	70,0%

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara





Sasaran keenam, "Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan", dicapai melalui strategi Peningkatan karakter dan wawasan kebangsaan pemuda. Arah kebijakan dari strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran di sekolah;
- b. Pembinaan organisasi kepemudaan.

Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran keenam sebagaimana tabel 6.

Tabel 6 Target Kinerja Sasaran Keenam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan	% pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya	40,0%

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Sasaran ketujuh, "Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik", dicapai melalui strategi (1) Fasilitasi pelayanan data statistik yang terintegrasi; (2) Fasilitasi fungsi pelayanan administrasi penunjang operasional urusan pendidikan; (3) Pengelolaan layanan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Arah kebijakan dari strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan;

Strategi 2: Pendampingan kegiatan yang menunjang program utama urusan wajib bidang pendidikan.

Strategi 3: Penerapan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran keenam sebagaimana tabel 7.





Tabel 7 Target Kinerja Sasaran Ketujuh

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80%

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

<u>Sasaran kedelapan</u>, "Meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah", dicapai melalui *strategi* (1) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan; (2) Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur. *Arah kebijakan* dari strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan;

Strategi 2: Pelatihan SDM di semua strata jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran keenam sebagaimana tabel 8.

Tabel 8 Target Kinerja Sasaran Kedelapan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP OPD	В

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Untuk merealisasikan kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, pada tahun 2022 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara memperoleh alokasi pagu anggaran untuk belanja langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022 sebesar Rp. 761.151.242.290,- dan pada DPA Perubahan sebesar Rp. 724.120.284.435,- atau berkurang sebesar Rp. 37.030.957.855,-.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dan RENSTRA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2022, banyak indikator kinerja yang telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sampai dengan akhir Tahun 2022, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 13 indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, terdapat 11 indikator tercapai dan 1 indikator belum tercapai.

Tabel 9 Rekapitulasi Ketercapaian Indikator per Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET.
Meningkatnya layanan	APS 5-6 tahun	80,00%	93,25%	116,57	
Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu	% TK terakreditasi	15,00%	73,86%	492,37	
Meningkatnya Layanan	APS 7-12 tahun	88,50%	95,63%	108,05	
Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu	APS 13-15 tahun	77,50%	92,86%	119,82	
	% SD Terakreditasi A	18,00%	42,30%	235,01	
	% SMP Terakreditasi A	35,00%	56,75%	161,62	
Meningkatnya Kualifikasi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% guru tersertifikasi	95,00%	86,85%	91,42	
Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal yang	% Anak Tidak Sekolah (ATS)	18,00%	85,81%	476,70	





SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KET.
merata, terjangkau dan bermutu	yang terfasilitasi di pendidikan non formal				
	% PKBM Terakreditasi	55,00%	100,00%	181,82	
Meningkatnya prestasi Pemuda Pelajar	% Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi	70,00%	97,78%	139,68	
Meningkatnya Pengembangan Karakter Pemda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan	% pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya	40%	100,00%	250,00	
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80%	78,46%	98,08	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP OPD	В	BB	102,30	

Keterangan:

: Tercapai

: Tidak Tercapai

Sumber: Dindikpora Kab.Banjarnegara

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selama tahun 2022. Selanjutnya Capaian Kinerja (performance results) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.





A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut merupakan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah, baik itu berupa dinas, badan, kantor ataupun bagian. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya manusia dan kewajiban yang dipercayakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 s/d 2022 yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan enam program utama dan satu program pendukung sebagaimana tercantum dalam perencanaan kinerja. Klasifikasi program pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara disusun berdasarkan jenjang pendidikan, ketenagaan kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan serta program pendukung. Program pendukung diperlukan untuk menunjang







kelancaran dalam pelaksanaan program-program utama yang akan dilaksanakan tersebut.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sebagai entitas Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban memenuhi target kinerja sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur capaian program yang telah ditetapkan. Ketercapaian indikator-indikator kinerja tersebut, diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 berdasarkan program utama pembangunan pendidikan. Ketercapaian Sasaran Strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 (ke satu) : Meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada arah pertumbuhan anak yang meliputi enam aspek perkembangan yaitu : agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional,





dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.

Mengingat sangat pentingnya pendidikan PAUD sebagai pembentuk karakter anak sebelum memasuki masa pendidikan dasar, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai pada masa periode renstra 2017-2022 dengan dua indikator utamanya sebagaimana tabel 10.

Dalam pelaporan LKjIP tahun 2022 ini, kinerja sasaran satu yang diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Realisasi Ketercapaian Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	:			TARGET 2022	REALISASI 2022	%	TARGET AKHIR	% TARGET JANGKA	
mindion	2019	2020	2021	2022	2022		RENSTRA	MENENGAH	
APS 5-6 tahun	NA	70,84	87,25	80,00	93,25	116,57	80	88,55	
% TK terakreditasi	45,60	67,75	72,22	15,00	73,86	492,37	15	451,67	

Sumber: Dindikpora Kab.Banjarnegara

Dari 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan, semua indikator telah terealisasi dengan baik dengan rata-rata persentase capaian sebesar 304,47%. Penjelasan capaian indikator tersebut sebagai berikut:

1.1. APS 5-6 tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah 5-6 tahun (usia PAUD). APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas



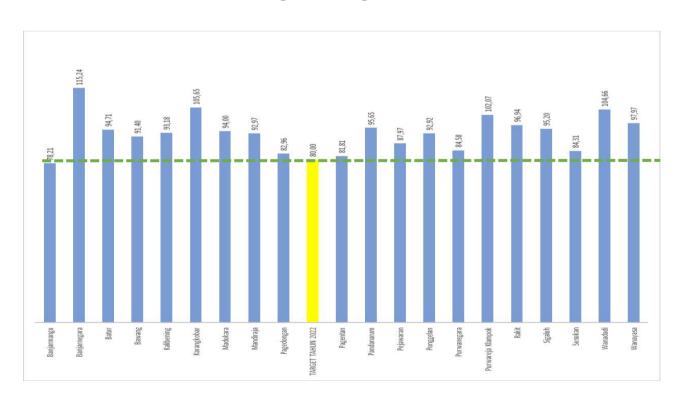


pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tingkat pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun, jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2022 sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 80,00% dapat terealisasi sebesar 93,25% dengan persentase capaian sebesar 116,57%. Atau dari penduduk usia 5-6 tahun sejumlah 32.831 orang, yang terlayani dalam prooses penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD sejumlah 30.616 orang.

Adapun peta sebaran di masing-masing kecamatan di Kabupaten Banjarnegara terkait Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik 2 Sebaran Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun



Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara





Dari grafik di atas terlihat bahwa hampir seluruh kecamatan telah memenuhi target pencapaian Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun di Tahun 2022 yaitu sebesar 80,00%, kecuali untuk Kecamatan Banjarmangu dengan pencapaian sebesar 78,21%.

APS 5-6 2022 Ketercapaian tahun pada Tahun diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam layanan pendidikan Anak Usia Dini, dengan menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga layanan PAUD. Selain itu hal tersebut tercapai seiring dengan semakin meratanya akses pelayanan pendidikan dengan indikasi meningkatnya lembaga layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, terutama jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. Walaupun target APS 5-6 tahun telah terlampaui, namun pemerintah tetap mengupayakan layanan pendidikan dapat terlaksana secara optimal terutama dalam hal perluasan akses dengan menjamin penduduk usia 5-6 tahun terlayani pada jenjang PAUD.

Terobosan yang dapat dilakukan di periode mendatang sebagai upaya peningkatan APS 5-6 tahun yang lebih baik antara lain dapat melalui hal-hal sebagai berikut :

- O) Penyediaan Pelayanan Anak Usia Dini melalui pemenuhan serta peningkatan sarana prasarana, pengembangan kelembagaan pendidikan terutama jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 1) Kebijakan Wajib PAUD untuk anak usia 4-6 tahun, dengan menjamin kebutuhan siswa sesuai standar SPM PAUD.
- Sosialisasi program dan kegiatan PAUD kepada masyarakat serta pembinaan kepada lembaga PAUD secara terus menerus dan berkelanjutan.

Untuk mendukung ketercapaian APS 5-6 tahun, kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2022 antara lain :





- 1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan PAUD melalui sumber pendanaan, dapat melalui APBD maupun alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 2) Pemerataan layanan pendidikan PAUD di masing-masing kecamatan dan ketersediaan pendidik maupun tenaga kependidikan khususnya dalam pemberian layanan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3) Menggandeng pihak desa, kecamatan maupun stake holder terkait untuk mengedukasi warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pengoptimalan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 4) Bantuan Operasional PAUD (BOP PAUD) guna mendukung operasional pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga PAUD.

1.2. Persentase TK Terakreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN SM). Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Pada pasal 2 ayat (1), lingkup SNP meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.







Pada Tahun 2022 capaian indikator persentase TK terakreditasi terealisasi sebesar 73,86% dari target yang ditetapkan sebesar 15,00% dengan persentase capaian sebesar 492,37%. Atau dari keseluruhan TK sejumlah 306 lembaga, yang telah terakreditasi sejumlah 226 lembaga. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi 72,22%, untuk capaian indikator persentase TK terakreditasi mengalami peningkatan sebesar 1,63%.

Terpenuhinya target akreditasi TK pada Tahun 2022 didukung oleh komitmen yang tinggi dari Dindikpora melalui Bidang PAUD Dikmas dalam mengupayakan kesiapan lembaga dalam proses akreditasi, diantaranya adalah dengan pembinaan kepada lembaga TK secara terus-menerus yang bertujuan untuk 1). Memberikan pemahaman tentang kebijakan pemerintah dan implementasi model pembelajaran TK yang berkarakter; pemahaman tentang peranan penilik sebagai Memberikan penjamin mutu dan evaluasi dampak terhadap pelaksanaan program TK; 3). Memberikan pemahaman tentang Gerakan TK Berkualitas; 4). Memberikan pemahaman tentang Gugus TK sebagai wahana peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan TK. Selain itu, peningkatan jumlah lembaga TK terakreditasi juga didukung regulasi dari pusat dimana Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penambahan kuota jumlah lembaga sasaran akreditasi lebih besar dari tahun sebelumnya.

Manfaat akreditasi itu sendiri secara umum merupakan bagian dari penjaminan dan usaha peningkatan mutu pendidikan. Secara langsung akreditasi TK menunjang peningkatan mutu program TK serta meningkatkan kinerja satuan TK.

Untuk mendukung ketercapaian akreditasi TK, kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2022 yaitu fasilitasi akreditasi kepada 306 lembaga TK yang ada. Selain itu, untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), diadakan sosialisasi dan pelatihan





kompetensi tenaga pendidik PAUD yang dilaksanakan secara berkala. Penyelenggaraan perlombaan dan ajang kreativitas juga menjadi wahana untuk menunjang peningkatan kualitas layanan pendidikan jenjang PAUD.

2. Sasaran 2 (ke dua) : Meningkatnya Layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu

Mengingat sangat pentingnya pendidikan dasar sebagai dasar dalam membentuk kecerdasan anak sebelum memasuki masa pendidikan selanjutnya, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan pendidikan dasar sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai pada masa periode renstra 2017-2022 dengan enam indikator utamanya sebagaimana tabel 11.

Pendidikan dasar merupakan dasar acuan sebelum melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Melalui pendidikan dasar peserta didik dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir kritis, membaca, menulis, berhitung, penguasaan dasar-dasar untuk mempelajari sains dan teknologi, dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Jika pada tingkat pendidikan dasar kurang diperhatikan, kemungkinan kualitas pendidikan menjadi kurang baik.

Dalam pelaporan LKjIP Tahun 2022 ini, kinerja sasaran dua yang diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi Ketercapaian Sasaran 2

INDIKATOR		REALISASI		TARGET	ARGET REALISASI 2022 2022	%	TARGET AKHIR RENSTRA	% TARGET JANGKA MENENGAH
KINERJA	2019	2020	2021	2022				
APS 7-12 tahun	104,02	106,48	90,84	88,55	95,63	108,05	88,55	120,25



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022



INDIKATOR		REALISASI		TARGET 2022	REALISASI 2022	%	TARGET AKHIR RENSTRA	% TARGET JANGKA MENENGAH
KINERJA	2019	2020	2021					
APS 13-15 tahun	85,84	92,75	86,47	77,50	92,86	119,82	77,50	119,68
% SD Terakreditasi A	43,97	48,41	36,35	18	42,30	235,01	18	268,94
% SMP Terakreditasi A	57,14	66,33	53,06	35	56,57	161,62	35	189,51

Sumber: Dindipora Kab. Banjarnegara

Dari 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan, semua indikator telah terealisasi dengan baik dengan rata-rata persentase capaian sebesar 156,12%. Penjelasan capaian indikator tersebut sebagai berikut:

2.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tingkat pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun, jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2022 sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 88,55% terealisasi sebesar 95,63% dengan persentase capaian sebesar 108,05%. Atau dari penduduk usia 7-12 tahun sejumlah 102.873 orang, yang terlayani pendidikannya sejumlah 98.373 orang. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 90,84%, capaian kinerja APS 7-12 tahun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,79%.

Peningkatan tersebut diakibatkan oleh pemulihan akibat pandemi covid-19 yang secara bertahap sudah dilaksanakan, untuk layanan pendidikan terutama proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, sehingga animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya kembali meningkat. Serta proses vaksinasi di masing-masing seluruh elemen masyarakat dan





peserta didik sebagai hal yang turut serta mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah tersebut.

Grafik 3 Sebaran APS 7-12 Tahun Wanayasa 91,89 Wanadadi 100,15 Susukan 91,15 Sigaluh 84,26 Rakit 95,26 Purwareja Klampok 115,15 Purwanegara 93,40 Punggelan 93,27 Pejawaran 92,11 95,02 Pandanarum Pagentan 89,65 Pagedongan 90,37 Target Tahun 2022 88,50 Mandiraja 90,39 Madukara 98,35 Karangkobar 103,73 Kalibening 95,92 Bawang 93,76 Batur 85,47 Banjarnegara 119,69 Banjarmangu 89,47 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Berdasarkan grafik tersebut dapat di lihat, pada Tahun 2022 sebaran angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun di masing-masing kecamatan yang belum mencapai target sebesar 88,50% sebanyak 2 (dua) kecamatan, yaitu di Kecamatan Batur dan Sigaluh. Hal tersebut menjadi perhatian kita bersama, agar dapat merubah karakter, budaya masyarakat yang kurang concern dalam mendukung kesukseskan penyelenggaraan pendidikan di



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022



Kabupaten Banjarnegara pada khususnya. Anak didik yang seharusnya sesuai dengan rentang usianya masih harus mengenyam pendidikan yang layak, disebabkan oleh adanya keterbatasan ekonomi menjadikan mereka berpotensi putus sekolah, karena tidak sanggup melanjutkan sekolah, atau bahkan yang lebih tragis sebagai tulang punggung keluarga, mencari nafkah di tengah-tengah keterbatasan ekonomi tersebut.

Selain hal tersebut, peningkatan layanan pendidikan formal juga harus dioptimalkan seiring dengan meredanya pandemi covid-19. Lembaga pendidikan yang ada mulai berbenah, peningkatan sarana prasarana yang memadai dengan di topang oleh SDM yang unggul, cakap dalam melayani pendidikan.

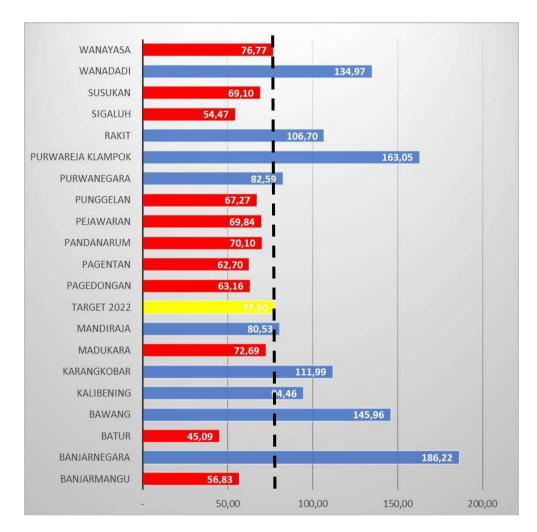
Sedangkan indikator APS 13-15 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 77,50% terealisasi sebesar 92,86% dengan persentase capaian sebesar 119,82%. Atau dari penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 49.101 orang, yang terlayani pendidikannya sejumlah 45.595 orang. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 86,47 %, capaian kinerja APS 13-15 tahun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,39%.

Adapun sebaran Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun di masing-masing kecamatan, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:





Grafik 4 Sebaran APS 13-15 Tahun



Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Berdasarkan grafik tersebut, untuk realisasi Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 77,50%. Akan tetapi berdasarkan sebaran angka tersebut, dari total 20 kecamatan yang ada, masih ada 11 kecamatan yang capaiannya di bawah target yaitu : Kecamatan Banjarmangu, Batur, Madukara, Pagedongan, Pagentan, Pandanarum, Pejawaran, Punggelan, Sigaluh, Susukan, dan Wanayasa. Itu artinya masih perlu kita intervensi dan di kaji penyebab APS 13-15 yang rendah, agar di





periode yang akan datang, akan menjadi lebih baik dan dapat ditingkatkan di masing-masing wilayah kecamatan.

Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian Angka Partisipasi Sekolah di seluruh jenjang pendidikan. Faktor internal pendidikan dapat memicu peningkatan ataupun penurunan pencapaian tersebut. Di antaranya: 1) ketersediaan daya tampung yang dalam hal ini diwakili oleh ketersediaan jumlah ruang kelas yang layak pakai, 2) ketersediaan guru / pendidik yang sesuai dengan kualifikasinya, 3) kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah sekolah yang sudah terakreditasi. Selanjutnya terkait faktor dari kondisi masyarakat, diantaranya: penghasilan orang tua, pendidikan orang tua, karakter dan budaya masyarakat, lingkungan sosial dan minat anak untuk sekolah.

Adapun ketercapaian Angka Partisipasi Sekolah pada Tahun 2022 diantaranya disebabkan karena semakin meratanya akses layanan pendidikan dasar dengan indikasi keterpenuhan jumlah layanan SD dan SMP di wilayah Banjarnegara melalui pendekatan akses layanan pendidikan seperti layanan SD-SMP satu atap dan penyelenggaraan kelas jauh (filial) di beberapa sekolah. Walaupun target APS telah terlampaui, meminimalisir adanya potensi anak sekolah yang terancam tidak melanjutkan sekolah / putus sekolah, pemerintah mengupayakan layanan pendidikan dasar dapat terlaksana secara optimal dengan menjamin penduduk usia pendidikan dasar terlayani pada jenjang SD dan SMP. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- Menjamin pelayanan pendidikan penduduk usia sekolah SD dan SMP dalam bentuk pemenuhan operasional siswa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- 2) Peningkatan aksesibilitas pendidikan di wilayah yang sulit di jangkau, mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara,



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022



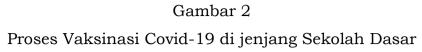
yang cukup luas dan topografi yang berbeda-beda di masingmasing wilayah kecamatan.

- 3) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
- 4) Optimalisasi peran pendidikan non formal melalui layanan pendidikan kesetaraan.
- 5) Sosialisasi ke sekolah yang belum memiliki ijin operasional, agar mengajukan ijin operasional.
- 6) Peningkatan daya tampung siswa dan penataan guru yang merata di seluruh layanan pendidikan.
- 7) Sosialisasi wajar dikdas 9 tahun ke masyarakat melalui pemerintahan desa / kecamatan.
- 8) Koordinasi dengan kepala Sekolah Dasar untuk dapat menginventarisir peserta didik yang lulus Sekolah Dasar dan tidak dapat melanjutkan.
- 9) Pengoptimalan pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemberian Bantuan Siswa Miskin, terutama untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- 10) Proses Pendataan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lakukan sedini mungkin dengan mengidentifikasi lulusan SD/Madrasah.
- 11) Memberikan treatment atau pendampingan terhadap siswa yang keluar/drop out, untuk dapat meneruskan sekolahnya kembali.

Selain hal tersebut, dalam rangka pemulihan pandemi covid-19 di masing-masing satuan pendidikan, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kembali angka partisipasi sekolah, maka sesuai dengan anjuran dari Pemerintah, dilakukan proses vaksinasi massal di seluruh satuan pendidikan, baik pendidik / tenaga kependidikannya, dan seluruh siswa yang ada.









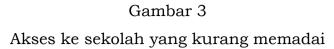
Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan di Tahun 2022 sebagai upaya dalam mendukung ketercapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) antara lain adalah :

- 1) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) maupun perbaikan / rehabilitasi sarana prasarana yang sudah rusak untuk menjamin keterpenuhan daya tampung siswa dan pengoptimalan proses kegiatan belajar mengajar.
- 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menunjang operasional sekolah.
- 3) Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sebagai upaya untuk menjaga siswa rentan putus sekolah agar tetap bersekolah.

Ke depan, kita tentunya berusaha dan berkomitmen bersama untuk dapat meningkatkan akses dan layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara, dengan berbagai upaya, dapat menggandeng stake holder terkait, agar capaian Angka Partisipasi Sekolah tersebut dapat meningkat tiap tahunnya. karena masih dijumpai anak-anak kita yang kesulitan untuk menuju ke sekolah, diakibatkan karena kondisi wilayah yang bervariatif.









Hal yang tak kalah penting dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), adalah terkait angka capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Banjarnegara.

1) Angka Rata-rata Lama Sekolah

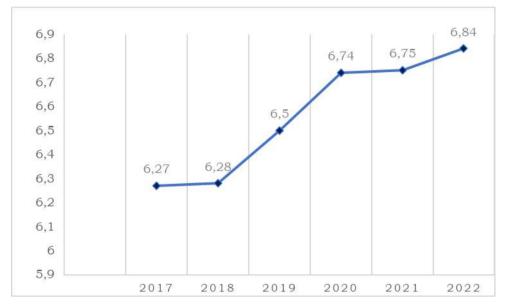
Perluasan akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, seperti juga indikator pendidikan lain yang penting seperti angka melek huruf. Hal ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan indikator peningkatan ratarata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah





dijalani. Adapun data capaian angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun (2017 s/d 2022) tersaji sebagaimana grafik berikut.

Grafik 5 Capaian angka Rata-rata Lama Sekolah Periode Tahun 2017 s/d 2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat capaian angka Rata-rata Lama Sekolah trennya ada kenaikan di setiap tahunnya. Untuk capaian tahun 2022 ada kenaikan sebesar 0,09 dibandingkan tahun 2021. Dari yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar 6,75 menjadi 6,84 di tahun 2022.

Akan tetapi kita masih perlu upaya yang lebih intens dalam peningkatan capaian tersebut, karena untuk Kabupaten Banjarnegara capaian angka Rata-rata Lama Sekolah masih rendah dibandingkan kabupaten lain di Jawa Tengah, yaitu peringkat ke-33 dari total 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

2) Angka Harapan Lama Sekolah

Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang

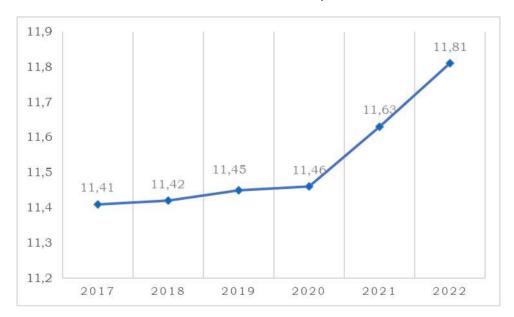




diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan Angka Harapan Lama Sekolah penduduk di Kabupaten Banjarnegara, selama kurun waktu tahun 2017 – 2022 terjadi peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Banjarnegara semakin menyadari pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2022, capaian angka Harapan Lama Sekolah selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 6 Capaian angka Harapan Lama Sekolah Periode Tahun 2017 s/d 2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat, untuk tahun 2022 ada kenaikan capaian angka Harapan Lama Sekolah di





Kabupaten Banajrnegara yaitu sebesar 0,18, berawal dari capaian di tahun 2021 sebesar 11,63 menjadi 11,81 di tahun 2022.

Akan tetapi, kita juga harus berupaya untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah tersebut ke depannya, karena untuk Kabupaten Banjarnegara masih menjadi kabupaten nomor urut 2 dengan capaian terendah se Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan 35 kabupaten/kota yang lain.

2.2. Akreditasi Sekolah

Melangkah ke capaian indikator selanjutnya. Pada Tahun 2022 indikator persentase SD terakreditasi A terealisasi sebesar 42,30% dari target yang ditetapkan sebesar 18% dengan persentase capaian sebesar 235,01%. Atau dari keseluruhan SD sejumlah 617 satuan pendidikan, yang telah terakreditasi A sejumlah 261 satuan pendidikan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi 36,35%, indikator persentase SD terakreditasi A mengalami kenaikan sebesar 5,95%.

Sedangkan indikator persentase SMP terakreditasi A terealisasi sebesar 56,57% dari target yang ditetapkan sebesar 35,00% dengan persentase capaian sebesar 161,62%. Atau dari keseluruhan SMP sejumlah 99 lembaga, yang telah terakreditasi A sejumlah 56 lembaga. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 53,06%, indikator persentase SMP terakreditasi A mengalami peningkatan sebesar 3,50%.

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang yang dalam hal ini adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

Menentukan kelayakan program satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non-formal pada setiap jenjang







dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dengan demikian, sekolah yang telah terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Jika suatu sekolah / lembaga pendidikan ingin mendapatkan akreditasi A maka perlu ada komitmen, dan hal yang penting diperhatikan adalah kepemimpinan juga sistem terintegrasi terhadap semua lini yang baik, tidak hanya peningkatan nilai akreditasi akan tetapi peningkatan budaya mutu lembaga pendidikan yang semakin baik juga perlu dilakukan.

Proses pelaksanaan akreditasi di masing-masing satuan pendidikan, tidak terlepas dari ketercukupan sarana prasarana yang ada, baik untuk kegiatan proses belajar mengajar, maupun dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersebar di masing-masing satuan pendidikan.

Adapun terobosan yang dapat dilakukan ke depan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai akreditasi yang telah diperoleh antara lain :

- 1) Melakukan pemetaan sekolah berdasarkan nilai dari delapan Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari 8 (delapan) standar, yaitu: (i) standar kompetensi lulusan; (ii) standar isi; (iii) standar proses; (iv) standar penilaian pendidikan; (v) standar tenaga kependidikan; (vi) standar sarana dan prasarana; (vii) standar pengelolaan; dan (viii) standar pembiayaan serta merencanakan pembiayaan yang dibutuhkan sebagai upaya ketercapaian delapan standar tersebut.
- 2) Pembinaan secara rutin terhadap kepala sekolah dan guru melalui pengawas sekolah berkaitan dengan proses





perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

3) Pengoptimalan seluruh elemen terkait yang terlibat dalam proses akreditasi di masing-masing satuan pendidikan.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan di Tahun 2022 sebagai upaya dalam mendukung ketercapaian akreditasi SD dan SMP antara lain adalah :

- 1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
- 2) Peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM).

3. Sasaran 3 (ke tiga) : Meningkatnya Kualifikasi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Hal ini merupakan salah satu syarat utama bagaimana mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkarakter. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 8 mengamanahkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan kualifikasi dan profesioanlisme guru sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai pada masa periode renstra 2017-2022 dengan indikator utamanya sebagaimana tabel 12.

Adapun langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara





untuk peningkatan kompetensi guru adalah melalui program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan, dan Program Induksi Guru Pemula (PIGP).

Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sedangkan Program Induksi Guru Pemula (PIGP) adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi guru pemula pada satuan pendidikan di tempat tugasnya. Karena untuk tahun 2022, Kabupaten Banjarnegara sekitar 901 orang guru yang lulus seleksi PPPK, sehingga perlu untuk peningkatan kompetensi yang mereka miliki melalui Program Induksi Guru Pemula ini.

Dalam pelaporan LKjIP Tahun 2022 ini, kinerja sasaran tiga yang diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 Realisasi Ketercapaian Sasaran 3

INDIKATOR	REALISASI			TARGET	REALISASI		TARGET	% TARGET
KINERJA	2019	2020	2021	2022	2022	%	AKHIR RENSTRA	JANGKA MENENGAH
% guru tersertifikasi	92,11	94,52	78,77	95,00	86,85	91,42	95	99,49

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

3.1. Persentase guru tersertifikasi

Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru adalah suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan juga uji kompetensi tenaga pendidik didalam mekanisme teknis yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Dinas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022



Pendidikan yang sudah bekerja sama dengan instansi pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi. Guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik sudah dinilai profesional didalam membuat sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, sehingga guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik hendaknya bisa membawa perubahan untuk pendidikan menjadi lebih baik dari segi proses ataupun output.

Program sertifikasi diikuti oleh guru yang belum memiliki sertifikat pendidik serta berstatus guru CPNS, PNS, atau guru tetap. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan/LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Mendikbud.

Pada Tahun 2022, realisasi indikator persentase guru tersertifikasi tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar 95,00%, hanya terealisasi sebesar 86,85% dengan persentase capaian sebesar 91,42%. Atau dari guru tetap sejumlah 6.235 orang yang telah tersertifikasi sejumlah 5.415 orang. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 78,77%, capaian kinerja persentase guru tersertifikasi pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 8,07%.

Target tersebut belum sepenuhnya dapat dicapai, dikarenakan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1. Peserta pre tes belum memenuhi ambang batas (Passing grade), sebagai prasyarat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru.
- 2. Adanya PPPK, CPNS / PNS formasi umum blm memiliki sertifikat pendidik sebagai prasyarat untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- 3. Banyaknya PNS guru yang pensiun di Tahun 2022.





Komitmen yang tinggi dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satunya diukur melalui kompetensi guru melalui program sertifikasi guru.

Sebagai upaya pemenuhan target indikator persentase guru tersertifikasi, terobosan yang dapat dilakukan di tahun-tahun mendatang antara lain :

- 0) Pendampingan pembiayaan aktivitas peningkatan kompetensi guru, misalnya seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- Peningkatan kompetensi guru melalui Program Induksi Guru Pemula (PIGP) dan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
- 2) Memperkuat forum KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sebagai wadah kerja sama guru – guru dan sebagai tempat mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan kemampuan profesional, yaitu dalam hal merencanakan, melaksanakan dan menilai kemajuan peserta didik.

Untuk mendukung ketercapaian indikator % guru tersertifikasi, kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2022 antara lain :

- 1) Fasilitasi Pelaksanaan Program Induksi Guru Pemula (PIGP)
- 2) Pengelolaan Sertifikasi Pendidik
- 4. Sasaran 4 (ke empat) : Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal yang merata, terjangkau dan bermutu

Pengertian dari pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan non formal paling banyak ditemui





pada pendidikan anak usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus memasak, musik, bimbingan belajar dan sebagainya.

Termasuk pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Salah satu tujuan diadakannya pendidikan non formal, yaitu untuk memberikan akses pendidikan bagi anak yang tidak sekolah atau putus sekolah agar bisa mengenyam pendidikan setara dengan pendidikan formal.

Mengingat sangat pentingnya pendidikan non formal dalam menjamin pendidikan masyarakat terutama terhadap anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan pendidikan non formal sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai pada masa periode renstra 2017-2022 dengan dua indikator utamanya sebagaimana tabel 13.

Dalam pelaporan LKjIP Tahun 2022 ini, kinerja sasaran empat yang diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 13 Realisasi Ketercapaian Sasaran 4

INDIKATOR	REALISASI			TARGET	REALISASI	%	TARGET AKHIR	% TARGET JANGKA
KINERJA	2019	2020	2021	2021	2022	/0	RENSTRA	MENENGAH
% Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan non formal	NA	7,78	48,95	18,0%	85,81%	476,70	18	43,22
% PKBM Terakreditasi	NA	38,89	80,00	55,0%	100,00	181,82	55	70,71

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara





Dari 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan, semua indikator terealisasi dengan baik dengan rata-rata persentase capaian sebesar 329,26%. Penjelasan capaian indikator tersebut sebagai berikut:

4.1. % Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan non formal

Prosentase Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan non formal merupakan ukuran daya serap penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah (usia 7-18 tahun) pada lembaga pendidikan non formal. Indikator ini digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan non formal khususnya bagi penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Semakin tinggi nilainya, semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tingkat pencapaian Prosentase Anak Tidak Sekolah yang terfasilitasi di pendidikan non formal, jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2022 sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 18,00% dapat terealisasi sebesar 85,81% dengan persentase capaian sebesar 476,70%. Atau dari ATS sejumlah 5.009 orang, yang terlayani di pendidikan non formal sejumlah 4.298 orang.

Jika dibandingkan dengan realisasi pencapaian % ATS tahun 2021 sebesar 7,78 %, sedangkan Tahun 2022 sebesar 48,95%, mengalami kenaikan sebesar 36,68%. Akan tetapi hal tersebut masih menjadikan tugas kita agar dapat mengoptimalkan peran lembaga pendidikan non formal melalui pendidikan kesetaraan untuk melayani anak-anak yang berpotensi putus sekolah / drop out ataupun tidak melanjutkan.

Selain itu, angka anak tidak sekolah yang masih cukup tinggi di Kabupaten Banjarnegara, menjadi isu yang harus segera dicari solusi bersama di tengah-tengah kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjarnegara. Berikut kami sajikan data sebaran Anak Tidak Sekolah di masing-masing kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.





Grafik 7 Sebaran ATS Tahun 2022



Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

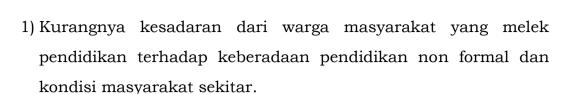
Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat untuk penyebaran Angka Tidak Sekolah di masing-masing kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Untuk Kecamatan Punggelan angka ATS nya paling tinggi, dibandingkan dengan kecamatan lain.

Walaupun realisasi capaian kinerja Tahun 2022 sudah melampaui target yang ditetapkan, tetapi angka tersebut masih cukup tinggi, hal ini diakibatkan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada penyesuaian proses pembelajaran secara daring/online, sehingga peserta didik dan orang tua wali murid cenderung apatis dalam mengikuti proses pembelajaran, berdampak pada potensi penambahan angka putus sekolah bagi anak usia sekolah.

Selain hal tersebut, beberapa kendala dalam penyelenggaraan pendidikan non formal antara lain adalah :







- 2) Kurangnya sosialisasi dan publikasi, sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan non formal di tengahtengah mereka. Banyak masyarakat yang belum paham tentang apa itu PLS (Pendidikan Luar Sekolah), apa itu PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
- 3) Belum meratanya akses pendidikan non formal pada setiap kecamatan dan desa.
- 4) Lokasi ATS yang tersebar di masing-masing wilayah desa dan kecamatan dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga tidak memungkinkan untuk ditangani secara keseluruhan oleh lembaga pendidikan non formal.

Strategi yang dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan indikator tersebut antara lain :

- 0) Kami dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara berupaya agar dapat mengalokasikan Bantuan Operasional Daerah (BOPDA) untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di pendidikan non formal, terutama bagi warga belajar yang usianya lebih dari 18 tahun, yang tidak diperkenankan mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan.
- 1) Sosialisasi dan Koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan berbagai unsur seperti stake holder pendidikan, OPD terkait (Dinas Sosial, Disnaker, Dindukcapil, Dinperindagkop), pemerintahan desa / kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, untuk dapat mengedukasi warga dalam meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dalam memperoleh pendidikan kesetaraan, baik melalui Kejar Paket A, Kejar Paket B atau Kejar Paket C.





- 2) Penambahan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
- 3) Pembukaan kelompok belajar (pokjar) di setiap desa untuk mendekatkan akses layanan pendidikan non formal.
- 4) Musyawarah bersama, diskusi antar pemangku kepentingan, merumuskan kebijakan bagaimana strategi peningkatan angka partisipasi sekolah dan solusi pemecahan masalah untuk meminimalisir jumlah siswa yang berpotensi putus sekolah.

Gambar 4
Focus Group Discussion (FGD)
Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah



4.2 % PKBM Terakreditasi

Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dilakukan untuk mengukur mutu pendidikan non formal baik keaksaraan maupun pendidikan kesetaraan, sehingga dapat diketahui sejauh mana kemajuan kegiatan proses belajar mengajar di lembaga tersebut. Akreditasi PKBM dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF),





Kemdikbud berdasarkan penilaian dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Tingkat pencapaian % PKBM Terakreditasi, jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2022 sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 55,00% terealisasi sebesar 100,00% dengan persentase capaian sebesar 181,82%. Atau dari PKBM sejumlah 21 lembaga, yang telah terakreditasi sejumlah 21 lembaga.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan di Tahun 2022 sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan pendidikan non formal antara lain adalah :

- 1) Penyelenggaraan Program kesetaraan (paket A, B dan C) dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
- 2) Program keaksaraan sebagai komitmen pemerintah terhadap pemberantasan buta aksara.
- 3) Fasilitasi terhadap lembaga non formal (PKBM, TBM, LKP) guna meningkatkan layanan pendidikan non formal.

5. Sasaran 5 (ke lima) : Meningkatnya perolehan kejuaraan ajang kompetisi pelajar

Pendidikan adalah modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimilikinya. Sekolah merupakan basis peningkatan kualitas yang berfungsi sebagai unit yang mengembangkan kurikulum, silabus, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian dimana muara akhirnya adalah dalam bentuk prestasi baik itu akademik atau nonakademik. Prestasi yang diraih sekolah, siswa ataupun guru menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan prestasi sebagai tolak ukur





kinerja pendidikan yang dijabarkan pada salah satu sasaran strategis yang akan dicapai pada masa periode renstra 2017-2022 dengan indikator utamanya sebagaimana tabel 14.

Dalam pelaporan LKjIP Tahun 2022 ini, kinerja sasaran lima yang diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Ketercapaian Sasaran 5

INDIKATOR	REALISASI			TARGET	REALISASI		TARGET	% TARGET
KINERJA	2019	2020	2021	2022	2022	%	AKHIR RENSTRA	JANGKA MENENGAH
% Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi	NA	NA	39,02	70	97,78	139,68	70	87,91

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Keseluruhan indikator pada sasaran lima sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 139,68%.

5.1. % Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi

Keolahragaan adalah salah satu modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas prestasi yang dimilikinya. Sekolah juga merupakan basis peningkatan kualitas keolahragaan yang berfungsi sebagai unit yang mengembangkan kurikulum, silabus, strategi pembelajaran, dan sistem pembinaan dimana muara akhirnya adalah dalam bentuk prestasi termasuk olahhraga. Prestasi yang diraih sekolah, siswa ataupun guru menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan prosentase Cabang







Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi sebagai indikator kinerja.

Pada Tahun 2022, indikator % Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi terealisasi sebesar 97,78%, dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%. Dari 45 cabang kejuaraan yang diikuti, perolehan medali sebanyak 44.

Hal tersebut dapat tercapai berkat partisipasi dari masingmasing peserta lomba, sehingga dapat mengikuti kejuaraan di level provinsi.

Untuk kejuaraan tingkat provinsi di jenjang SD yang diikuti, terdiri Lomba Mapsi SD dan FTBI SD yang terbagi menjadi 4 (empat) cabang kejuaraan yaitu Cabang Lomba Wudlu dan Shalat Putri, Kaligrafi Putra, Khitobah Putri dari jenis lomba MAPSI SD dan Menulis Aksara Jawa Putra dari lomba FTBI SD. Adapun peroleh medali tersebut berasal dari Juara 1 di Cabang Lomba Kaligrafi Putra, Juara 2 di Cabang Lomba Khitobah Putri, Juara 3 di Cabang Lomba Menulis Aksara Jawa Putra.

Sedangkan untuk kejuaraan level provinsi berikutnya yang diikuti oleh jenjang SMP terdiri dari 5 cabang Lomba yaitu :

- 1. Lomba Desain Poster oleh perwakilan siswa dari SMP Negeri 2 Rakit dan menjadi perwakilan provinsi untuk melangkah ke level nasional.
- 2. Lomba OSN Bidang IPS oleh perwakilan siswa dari SMP Negeri 1 Mandiraja dan menjadi perwakilan provinsi untuk melangkah ke level nasional.
- 3. Lomba Pidato Putri, siswa SMP N 1 Banjarnegara, sebagai Juara I di tingkat provinsi.
- 4. Lomba Pidato Putra, siswa SMP N1 Banjarnegara, sebagai Juara II di tingkat provinsi.
- 5. Lomba Nembang Macapat Putri, siswa SMP N 5 Banjarnegara, sebagai Juara II Tingkat provinsi.





Sedangkan untuk pelaksanaan POPDA sebanyak 36 cabang olah raga yang dilombakan di level provinsi, dan masing-masing mendapatkan medali penghargaan baik medali emas, perak maupun perunggu.

Gambar 5
Penyerahan Trophy Kejuaraan Cabang Olahraga Panahan Putri POPDA
Tingkat Provinsi Jawa Tengah



Terobosan yang telah dilakukan dalam meningkatkan prestasi pelajar di Kabupaten Banjarnegara antara lain melalui seleksi cabang perlombaan POPDA, KSN, FL2SN, GSI, KOSN, maupun event prestasi lainnya. Langkah-langkah yang akan dilakukan guna meningkatkan prestasi pelajar di Kabupaten Banjarnegara antara lain :

- 1) Penyelenggaraan lomba atau kompetisi olahraga secara rutin tiap tahunnya sebagai media untuk proses penjaringan pelajar berprestasi.
- 2) Peningkatan kualitas pelatih atau tutor secara teknis maupun manajerial.
- 3) Pemberian penghargaan terhadap pelajar, atlet, pelatih dan tutor berprestasi.





Adapun kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung keberhasilan pada indikator sasaran enam antara lain :

- 1) Penyelenggaraan kompetisi kejuaraan pelajar dengan berbagai cabang lomba.
- 2) Peningkatan kompetensi tutor dan pelatih.
- 3) Penghargaan untuk atlet, pelajar, tutor dan pelatih berprestasi.

Sebagai komitmen bersama dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, sebagai wujud untuk pemberian penghargaan kepada atlet / pelajar yang berprestasi, diadakan perhelatan akbar yang melibatkan seluruh elemen di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang di kemas dengan konsep pemberian penghargaan dan pertunjukan ajang kreativitas pelajar dalam tajuk "Gebyar Profil Pendidikan / Dindikpora Awards" yang dilaksanakan di Tahun 2022.

Gambar 6 Pelaksanaan Gebyar Profil Pendidikan "Dindikpora Awards"







6. Sasaran 6 (keenam) : Meningkatnya Pengembangan Karakter Pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan

Generasi muda atau yang lebih dikenal dengan pemuda merupakan aset berharga bangsa. Pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara, sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut. Pemuda memiliki tiga peran utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Pertama, sebagai generasi penerus yang konsisten melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Kedua, sebagai generasi pengganti untuk menggantikan para generasi tua yang belum mampu mengemban amanat. Ketiga, sebagai generasi pembaharu yang bersungguh-sungguh berjuang mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan konsep pengembangan karakter pemuda sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai pada masa periode renstra 2017-2022 dengan indikator utamanya sebagaimana tabel 15.

Dalam pelaporan LKjIP Tahun 2022 ini, kinerja sasaran tujuh yang diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Realisasi Ketercapaian Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			-	REALISASI	%	TARGET AKHIR	% TARGET JANGKA
	2019	2020	2021	2022	2022		RENSTRA	MENENGAH
% pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya	NA	NA	100	40	100%	254	40	250

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara





Keseluruhan indikator yang mendukung sasaran enam telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan rata-rata persentase capaian sebesar 254,00%. Adapun penjelasan terhadap ketercapaian tersebut sebagai berikut :

6.1 % pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya

Kepeloporan bidang pendidikan merupakan upaya nyata pemuda yang secara riil menghasilkan karya-karya pendidikan meliputi : inovasi, metodologi, model pembelajaran, media dan alat bantu pembelajaran, teknologi pembelajaran, pegembangan dan pengelolaan pendidikan secara swadaya baik formal maupun informal. Sub-sub bidang pendidikan tersebut merupakan fenomena atas tindakan kepeloporan pemuda yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diapresiasi oleh pelbagai pihak lain.

Pada Tahun 2022, indikator % pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya terealisasi sebesar 100%, melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 40%. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pada indikator sasaran tujuh yaitu dengan mengadakan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda yang diikuti oleh 355 orang. Selain itu dilaksanakan pula Pelatihan Kader Pengembangan, Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda yang diikuti oleh 15 masing-masing orang peserta di wilayah se Kabupaten Banjarnegara dengan rincian terbagi untuk pelatihan di Kelompok Bidang Start Up Digital Marketing, Kelompok Bidang Salon Kecantikan, Kelompok Bidang Kuliner Pengolahan Ikan.

Adapun inovasi yang telah dilakukan yaitu pada bidang pengembangan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata,





bidang pendidikan, bidang agama sosial budaya, bidang pangan dan teknologi.

Terobosan yang telah dilakukan dalam meningkatkan partsipasi pemuda Kabupaten Banjarnegara dalam program kepeloporan antara lain :

- 1) Mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan.
- 2) Penanaman jiwa nasionalisme pemuda sejak dini pada lingkup sekolah sebagai upaya meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara guna meningkatkan potensi yang ada pada dirinya sehingga menumbuhkan inovasi yang bisa membangun bangsa.

Selain pelaksanaan kegiatan tersebut, kita patut berbangga, karena Kabupaten Banjarnegara menjadi juara umum pada pelaksanaan Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di kota Solo. Kabupaten Banjarnegara berhasil meraih juara pada beberapa bidang perlombaan yang dilombakan, yaitu :

- 1. Juara 1 Bidang Fotografi Putra
- 2. Juara 2 Bidang Fotografi Putri
- 3. Juara 2 Bidang Video Inovasi Pemuda
- 4. Juara 3 Bidang Tari Daerah (Putra)
- 5. Juara 3 Bidang Tari Daerah (Putri)

7. Sasaran 7 (ke tujuh) : Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (*clean government*) dan kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas kepastian





hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. Dalam konteks pembangunan sistem administrasi negara, reformasi birokrsai sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya sebagai tindak lanjut dari reformasi birokrasi adalah melaksanakan perbaikan layanan publik di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan konsep *good* and *clean governance* sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai pada masa periode renstra 2017-2022 dengan indikator utamanya sebagaimana tabel 16.

Dalam pelaporan LKjIP Tahun 2022 ini, kinerja sasaran lima yang diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Realisasi Ketercapaian Sasaran 7

INDIKATOR	REALISASI			TARGET	REALISASI		TARGET	% TARGET
MINED IA	2019	2020	2021	2022	2022	%	AKHIR RENSTRA	JANGKA MENENGAH
Survey Kepuasan Masyarakat	82,41	81,83	81,20	80	78,46	98,08	80	102,29

 ${\tt Sumber}: {\it Dindikpora~Kab.~Banjarnegara}$

Keseluruhan indikator yang mendukung sasaran tujuh belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan rata-rata persentase capaian sebesar 98,08%. Adapun penjelasan terhadap ketercapaian tersebut sebagai berikut :

a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini







diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Pada Tahun 2022, SKM Dindikpora belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, karena hanya tercapai 78,46 dari target 80,00 dengan prosentase capaian 98,08%. bahkan capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi SKM Tahun 2021, untuk Tahun 2022 mengalami penurunan dari capaian tahun 2021 sebesar 2,74. Hal ini menjadi tugas bersama seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan, sehingga nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut dapat meningkat.

Sebagai upaya untuk memenuhi pelayanan yang optimal kepada masyarakat, kita berupaya dengan melengkapi sarana prasarana yang kurang memadai, merawat dan memelihara yang sudah ada, serta tidak menutup kemungkinan menambah prasarana lain agar pelayanan dapat dioptimalkan. Adapun saran dan masukan masyarakat yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, terkait peningkatan pelayanan prima, antara lain:

1) Perluasan tempat parkir yang memadai dan adanya petugas parkir agar tertib;







- 2) Penataan ruang layanan yang memadai, tidak menjadi tempat penumpukan berkas dokumen;
- 3) Penambahan ruang tunggu / kursi tunggu tiap layanan;
- 4) Penambahan penyebaran informasi lewat media sosial untuk peningkatan kelancaran komunikasi dan informasi secara online untuk kecepatan dan kemudahan bagi pengguna layanan;
- 5) Memaksimalkan saluran penangan pengaduan masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti;
- 6) Peningkatan keramahan dan kompetensi petugas layanan;
- 7) Ketertiban dan kedisiplinan petugas layanan terhadap waktu pelayanan;
- 8) Penambahan personil pelayanan dan petugas resepsionis untuk pelayanan cepat dan lancar;
- 9) Pengadaan lift ke lantai dua dan tiga.

Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan sarana prasarana kantor yang memadai, pembenahan manajemen, evaluasi kinerja di internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga juga dioptimalkan, sehingga dapat melayani masyarakat yang datang ke kantor Dindikpora secara langsung yang memiliki keperluan administraif terkait dengan pendidikan. Pemberian layanan lainnya juga berupa penyediaan pelayanan bagi tamutamu kedinasan yang selalu diupayakan untuk memberikan pelayanan prima, perbaikan sarana prasarana kantor secara berkala dan sebagainya.

Dalam rangka mendukung pelayanan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, terutama di saat - saat pandemi yang belum kunjung usai hingga saat ini, sesuai dengan protokol kesehatan yang memadai, di setiap pintu masuk ruangan disediakan hand sanitizer yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.





Berikut rincian nilai SKM Dindikpora pada Tahun 2022:

Tabel 17 Realisasi SKM per Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Mutu	Kinerja
1	Persyaratan	3.114	В	Baik
2	Prosedur	3.063	В	Baik
3	Waktu pelayanan	2.913	С	Kurang Baik
4	Biaya/tarif	3.531	В	Baik
5	Produk layanan	3.080	В	Baik
6	Kompetensi pelaksana	2.820	С	Kurang Baik
7	Perilaku pelaksana	3.146	В	Baik
8	Maklumat Pelayanan	2.947	В	Baik
9	Penanganan pengaduan	3.659	A	Sangat baik

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Secara umum setiap unsur pelayanan sudah terealisasi dengan baik pada Tahun 2022. Dari sembilan unsur pelayanan yang dipersyaratkan satu unsur terealisasi dengan kinerja sangat baik, dua unsur dengan kinerja kurang baik dan sisanya dengan kinerja baik. Pada unsur waktu pelayanan dengan kinerja kurang baik perlu dilakukan pembenahan agar masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan sistem informasi untuk mempermudah akses layanan. Sedangkan unsur kompetensi pelaksana yang juga berkinerja kurang baik, maka diupayakan untuk peningkatan kompetensi dari masing-masing pelaksana dalam pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat.

Ke depan, upaya peningkatan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan terus dilakukan. Beberapa langkah





antisipasi/upaya yang di ambil agar target indikator kinerja dapat tercapai secara lebih maksimal antara lain :

- 1) Mempertahankan kinerja parameter-parameter yang telah memiliki indeks kepuasan tinggi dan di atas rata-rata indeks.
- 2) Meningkatkan kinerja parameter-parameter yang telah memiliki indeks kepuasan tinggi, namun masih di bawah rata-rata indeks.
- 3) Memperbaiki kinerja parameter-parameter yang belum memiliki indeks kepuasan tinggi.

8. Sasaran 8 (ke delapan) : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Good governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat, sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efesien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu : bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan konsep *good* and *clean governance* sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai pada masa periode renstra 2017-2022 dengan indikator utamanya sebagaimana tabel 18.

Dalam pelaporan LKjIP Tahun 2022 ini, kinerja sasaran lima yang diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang tertuang





dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Realisasi Ketercapaian Sasaran 8

INDIKATOR	REALISASI			TARGET REALISASI			TARGET	% TARGET	
KINERJA	2019	2020 2021 2022 2022		%	AKHIR RENSTRA	JANGKA MENENGAH			
Nilai AKIP	BB (76,1 0)	BB (75,18	BB (76,91)	B (>60-70)	73,15	104,50	B (>60-70)	116,67	

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Keseluruhan indikator yang mendukung sasaran delapan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan rata-rata persentase capaian sebesar 104,50%. Adapun penjelasan terhadap ketercapaian tersebut sebagai berikut :

b. Nilai AKIP

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Penilaian tersebut merupakan akumulasi dari 80% penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan 20% dari capaian kinerja. Penerapan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2022 realisasi indikator nilai AKIP telah mencapai target yang ditetapkan, dari target dengan predikat B berhasil terealisasi dengan predikat BB dengan persentase capaian kinerja sebesar 104,50%, bahkan telah melampaui dari target akhir renstra dengan predikat B.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,76. Pada tahun 2021 skor AKIP Dindikpora memperoleh nilai 76,91 dengan





predikat BB, sedangkan Tahun 2022 memperoleh nilai 73,15 dengan predikat BB.

Berikut rincian nilai akuntabilitas kinerja Dindikpora pada Tahun 2022 :

Pencapaian Sasaran/Kinerja
Organisasi

20

14,38

Pengukuran Kinerja

10

10

14,38

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Grafik 8 Realisasi Komponen Manajemen Kinerja

Sumber: Inspektorat Kab. Banjarnegara

Dari lima komponen manajemen kinerja yang telah dievaluasi, kesenjangan terbesar terhadap bobot nilai yang dipersyaratakan terdapat pada komponen pengukuran kinerja dengan selisih sebesar 10,62. Untuk itu, sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, beberapa langkah yang dapat dilaksanakan di periode mendatang, antara lain :

 Melakukan perbaikan / review atas dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, terutama melakukan review atas indikator kinerja eselon II, III dan IV.





- 2) Melakukan casscading indikator kinerja mulai dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV.
- 3) Mengoptimalkan sistem evaluasi internal pada seluruh bidang teknis dan membangun sistem aplikasi evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan analisis tingkat efisiensi program/kegiatan dibandingkan dengan indikator kinerja yang dicapai. Tingkat efisiensi dihitung menggunakan ketentuan persentase rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada program yang mendukung sasaran.

Tabel 19 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Rata-rata % Realisasi Indikator Kinerja	Rata-rata % Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
Meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu	304,47	95,02	209,45	
Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar yang merata, terjangkau dan bermutu	156,12	98,73	57,39	
Meningkatnya Kualifikasi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	91,42	94,39	-2,97	
Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal yang merata, terjangkau dan bermutu	329,26	99,64	229,62	
Meningkatnya perolehan kejuaraan ajang kompetisi pelajar	139,68	99,51	40,17	
Meningkatnya Pengembangan Karakter Pemuda melalui gerakan revitalisasi dan	250,00	96,58	153,42	





konsolidasi gerakan				
kepemudaan				
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	99,08	99,26	-1,19	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	104,50	99,26	5,24	

= efisien = tidak efisien

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Berdasarkan tabel di atas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022 dengan hasil yang cukup baik, dilihat dari realisasi indikator kinerja di atas 100% pada hampir semua sasaran strategis. Bahkan satu sasaran menunjukkan efisiensi anggaran yang sangat tinggi, yaitu pada sasaran Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal yang merata, terjangkau dan bermutu.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan ketercapaian yang tinggi pada enam sasaran strategis ditunjukkan dengan selisih positif antara rata-rata persentase realisasi indikator kinerja dikurangi dengan rata-rata persentase penyerapan anggaran pada Tahun 2022.

Dua sasaran strategis menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah yaitu pada sasaran meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dengan tingkat efisiensi sebesar -2,97. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase penyerapan anggaran yang digunakan sebesar 94,39% dibandingkan dengan persentase kinerja yang dicapai sebesar 91,42%. Belum optimalnya persentase kinerja ini lebih disebabkan oleh rendahnya angka sertifikasi guru, diakibatkan banyaknya peserta pre test yang belum memenuhi ambang batas (passing grade), untuk CPNS/PNS baru formasi umum memiliki sertifikasi pendidik serta penerimaan formasi PPPK yang cukup banyak di tahun 2022 dan belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi pendidik.





Sasaran berikutnya yang menunjukan tingkat efisiensi cukup rendah yaitu sasaran meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik. Hal ini dapat dilihat dari penurunan nilai SKM di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sudah optimal melalui program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2022 seperti pengoptimalan proses seleksi sertifikasi guru dan pengoptimalan ketersediaan sarana prasarana demi meningkatnya pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui optimalisasi penggunaan informasi teknologi (IT) baik dalam pertemuan menggunakan zoom meeting, penambahan sarana prasarana pendukung lewat pencatatan dan pelaporan data dan informasi secara online, keterlibatan pihak luar dalam pengelolaan kegiatan seperti, penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, pengunaan tenaga ahli dan kerjasama dengan para stakeholder dari pihak pemerintah maupun swasta.

Tabel 20 Proporsi Anggaran Tahun 2022

Sumber Pendanaan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
APBD	643.995.072.290	608.920.255.840	-35.074.816.450
DAK	17.395.370.000	17.395.370.000	-
BOS	99.760.800.000	97.804.658.595	-1.956.141.405
APBD Provinsi	-	-	-
Jumlah	761.151.242.290	724.120.284.435	-37.030.957.855

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara





Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan 7 program, 18 kegiatan dan 74 sub kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2021 mengelola 7 program, 18 kegiatan dan 68 sub kegiatan. Jika dibandingkan pada Tahun 2021 maka pada Tahun 2022 program/kegiatannya lebih banyak.

Program dan kegiatan pada Tahun 2022 secara umum telah berhasil dilaksanakan, dilihat dari rata-rata persentase realisasi indikator kinerja penunjang sasaran yang sudah mencapai target. Adapun dua sasaran yang tidak terealisasi kinerjanya di Tahun 2022 disebabkan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya pada halaman sebelumnya.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung kinerja di Tahun 2022 antara lain :

- 1) Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
- 2) Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 3) Komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

B. Realisasi Anggaran

1. Struktur Belanja

Struktur Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam DPPA 2022 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja





Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Adapun Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Adapun Belanja Pegawai ada yang digunakan pula untuk honorarium kegiatan. Belanja Barang dan Jasa untuk penunjang kelancaran operasional kegiatan, sedangkan Belanja Modal untuk pengadaan sarana prasarana yang merupakan asset tetap OPD.

Dilihat dari struktur belanja, persentase belanja pegawai menduduki proporsi paling besar, dibandingkan dengan belanja yang lain, hal ini disebabkan untuk membiayai seluruh gaji ASN yang terdiri dari PNS struktural maupun fungsional (guru, pengawas dan penilik), PNS di internal kantor Dindikpora beserta PPPK dengan total sejumlah 5.682 orang.

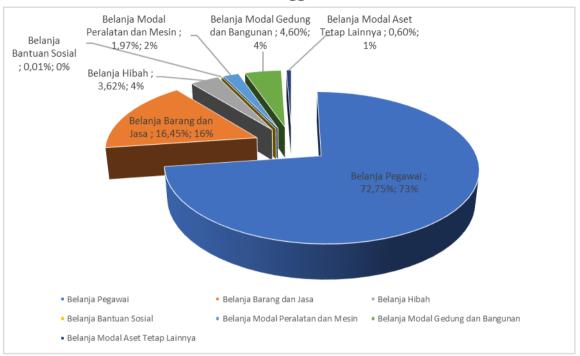
Untuk DPA Tahun 2022 antara internal Dindikpora dan satuan pendidikan yang mengelola dana APBD menjadi satu kesatuan. Satuan pendidikan tersebut terdiri dari 75 SMP Negeri, 4 TK Negeri dan 1 SKB. Adapun untuk Total alokasi belanja Daerah pada DPA 2022 sebesar Rp. 764.843.970.640,- dan pada DPA Perubahan sebesar Rp. 720.791.108.002,- atau berkurang sebesar Rp. 44.052.862.638,-. Distribusi belanja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 556.756.571.606,- / (72,75%)
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 125.917.716.548,- / (16,45%)
- 3) Belanja Hibah sebesar Rp. 27.728.023.000,- / (3,62%)
- 4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 100.000.000,- / (0,01%)
- 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 15.041.366.656,- / (1,97%)
- 6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 35.173.222.700,- / (4,60%)
- 7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 4.627.070.130,- / (0,60%)





Grafik 9 Struktur Belanja Tahun Anggaran 2022



Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

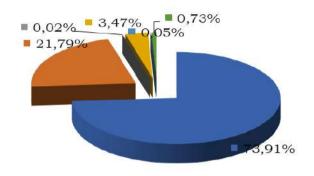
Adapun dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 (enam) program utama dan 1 (satu) program penunjang ketercapaian sasaran pada perjanjian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 562.582.391.242,-;
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 165.853.174.300,-;
- 3) Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp. 175.001.500,-;
- 4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 26.414.860.748,-
- 5) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar Rp. 398.385.000,-
- 6) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp. 5.552.429.500,-
- 7) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar Rp. 175.000.000,-





Grafik 10 Proporsi Belanja Berdasarkan Program Penunjang dan Program Utama Penunjang Sasaran



- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Program Pengelolaan Pendidikan
 Program Pengembangan Kurikulum
 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Program Pendelik dan Tenaga Kapendidikan
 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

2. Realisasi Belanja

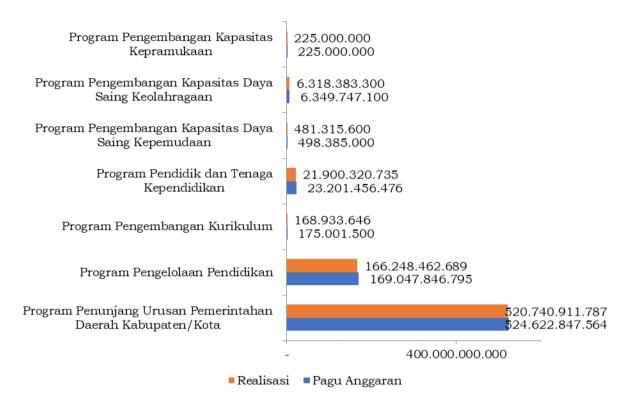
Dalam LKjIP ini disajikan realisasi belanja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 program penunjang dan utama pendukung sasaran yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Dari total belanja langsung program utama penunjang sasaran strategis RENSTRA sebesar Rp. 724.120.284.435,terealisasi sebesar Rp. 716.083.327.757,- atau 98,89%.

Berikut tersaji grafik daya serap anggaran dari total belanja langsung Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2022:





Grafik 9 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Penunjang dan Program Utama Penunjang Sasaran



Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Untuk tahun anggaran 2022, secara umum realisasi penyerapan anggaran dapat dioptimalkan. Adapun terkait dengan beberapa permasalahan penyerapan angaran yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022, secara umum di tahun yang akan datang perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur, mempedomani Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun, pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan time schedule yang sudah direncanakan dan tertib administrasi serta tata kelola pertanggungjawaban keuangan.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2022 di antaranya sebagai berikut :





1. Urusan Pendidikan:

- a. Masih tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Banjarnegara yang tersebar di masing-masing wilayah kecamatan. Sehingga perlu sinergitas antara pemangku kepentingan, perlu aksi nyata bagaimana mencari formulasi / strategi penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tersebut.
- b. Kurangnya sarana prasarana yang memadai di masing-masing satuan pendidikan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan pelaksanaan ANBK belum berjalan optimal.
- c. Masih ada sekolah yang belum mendapatkan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikarenakan tidak sinkron data di DAPODIK menjelang waktu penetapan Cut Off BOS.
- d. Ada anak yang sekolah tapi belum terdaftar di dapodik, dikarenakan sekolah tersebut belum ada ijin operasionalnya.
- e. Tren di masyarakat yang lebih memilih sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri, terutama di jenjang pendidikan Sekolah Dasar, sehingga perlu peningkatan kualitas pendidik melalui berbagai macam treatment untuk peningkatan kualitas dan pelayanan di masing-masing satuan pendidikan.
- f. Untuk jenjang Sekolah Dasar personilnya kurang, sehingga banyak wiyata bakti yang menjadi guru dengan kualifikasi ijasah tidak linier, dan tanggung jawab dengan peserta didik tidak maksimal.
- g. Peran pengawas belum maksimal.
- h. Orang tua siswa lebih cenderung menyekolahkan ke SD IT / sekolah swasta yang lebih banyak pembelajaran materi agama, karena di sekolah negeri kekurangan Guru Pendidikan Agama Islam.
- i. Ketercukupan sarana prasarana masih belum merata, terutama gedung sekolah yang kurang memadai.





j. Keterbatasan personil di jenjang Sekolah Dasar, belum ada tenaga administrasi di masing-masing Sekolah Dasar, dampaknya tugas guru kurang optimal dalam penyampaian materi kepada peserta didik karena merangkap tugas sebagai tenaga administrasi di sekolah.

2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan mendukung dalam proses pembibitan atlet, pelatihan maupun pembinaan atlet-atlet yang akan melaksanakan pertandingan, baik di level kabupaten maupun propinsi.
- b. Minat para pemuda dalam mengikuti ataupun berpartisipasi dalam seleksi pemuda pelopor, pelatihan kewirausahaan, dikarenakan publikasi dan sosialisasi yang masih minim.
- c. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan POPDA dari Provinsi baru rilis setelah DPA ditetapkan, sehingga perlu penyesuaian belanja dan memproses pergeseran anggaran.

Secara rinci berikut tersaji data penyerapan anggaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2022 :

Tabel 21 Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	KETERANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	717.047.152.335	716.083.327.757	99,87	
PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	524.622.847.564	520.740.911.787	99,26	
Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	557.976.600	532.221.059	95,38	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	305.746.600	289.713.059	94,76	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	117.905.600	109.835.600	93,16	





URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	KETERANGAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Kegiatan : Administrasi Keuangan	134.324.400	132.672.400	98,77	
Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	518.771.993.891	515.124.791.963	99,30	
Tenyediaan daji dan Tunjangan Non	517.729.061.891	514.149.183.538	99,31	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	842.232.000 200.700.000	774.923.850 200.684.575	92,01	
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	796.486.000	750.509.000	94,23	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	50.000.000	100	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	199.101.200	192.306.200	96,59	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			,	
	362.144.800	329.224.300	90,91	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	105 040 000	170 070 500	06.60	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.240.000 714.011.900	178.978.500 710.037.281	96,62	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	15.394.000	15.394.000	100	
Kantor	63.731.300	63.731.300	100	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.788.000	20.788.000	100	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.788.000	30.788.000	100	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang	604.098.600	600.123.981	99,34	
Urusan Pemerintahan Daerah	1.344.873.040	1.268.182.884	94,30	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	428.150.000	378.363.372	88,37	Pembayaran listrik yang pembebanannya tidak sama tidak sama tiap bulan, sehingga penyusunan Rencana kebutuhan anggarannya tidak dapat di buat sama tiap bulannya, sesuai dengan beban penggunannya.
Kegaiatan : Pemeliharaan Barang Milik	916.723.040	889.819.512	97,07	
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.437.506.133	2.355.169.600	96,62	





URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	KETERANGAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.000.000	107.066.900	95,60	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.000.000	107.000.900	93,00	
D 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	1.645.231.333	1.596.788.900	97,06	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	680.274.800 169.047.846.795	651.313.800 166.248.462.689	95,74 98,34	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	93.096.377.347	92.060.324.716	98,89	
Penambahan Ruang Kelas Baru				
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	1.062.200.000	1.060.067.000	99,80	
Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.475.550.000	4.454.321.450	99,53	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	16.695.923.500	16.593.270.500	99,39	
Sekolah	890.300.000	886.092.750	99,53	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	792.072.000	99,01	
Pengadaan Mebel Sekolah	000.000.000	132.012.000	22,01	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	203.740.000	199.075.000	97,71	
Sekolah Dasar	120.000.000	116.400.000	97,00	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.228.000.000	3.127.664.000	96,89	
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	350.000.000	340.120.502	97,18	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			,	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	55.000.000	53.946.986	98,09	
Siswa	300.000.000	297.696.100	99,23	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	116.409.200	95.603.700	82,13	Adanya kendala dalam pencairan Honor Narasumber dikarenakan peserta kegiatan dan narasumber dalam naungan yang sama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	64.644.254.647	63.891.293.728	98,84	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	155.000.000	152.701.000	98,52	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
Penambahan Ruang Kelas Baru	51.675.932.848	50.934.380.497	98,56	
	1.234.768.000	1.229.145.000	99,54	





URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	KETERANGAN
Pembangunan Perpustakaan Sekolah				
	699.416.000	691.104.161	98,81	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.569.106.500	3.559.564.000	99,73	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah				
	1.833.734.000	1.831.501.000	99,88	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				
Sekolah	4.230.517.000	4.221.592.000	99,79	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru				
Sekolah	1.239.762.000	1.233.668.000	99,51	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan				
Sekolah	603.106.000	599.129.000	99,34	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
	2.366.121.500	2.353.724.000	99,48	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				
	120.000.000	119.438.500	99,53	
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	120.000.000	119.100.000	33,00	
	397.664.300	397.063.000	99,85	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	03110011000	03110001000	33,00	
	968.100.000	886.837.000	91,61	
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	163.000.000	162.314.100	99,58	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
Tortama	35.000.000	34.457.200	98,45	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas				
Siswa	641.296.600	637.721.600	99,44	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	149.158.000	127.558.000	85,52	Adanya kendala dalam pencairan Honor Narasumber dikarenakan peserta kegiatan dan narasumber dalam naungan yang sama
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	103.429.000	82.170.837	79,45	Kurang cermat dalam menghitung volume kegiatan pada saat perencanaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah				
Pertama	33.160.403.948	32.606.183.099	98,33	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
	161.350.000	161.210.000	99,91	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20.217.846.600	19.210.867.476	95,02	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	788.653.000	788.653.000	100	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	755.055.000	700.000.000	100	
	480.000.000	480.000.000	100	
	100.000.000	100.000.000	100	1





URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	KETERANGAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	660.000.000	660.000.000	100	
Pengadaan Mebel PAUD				
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	10.000.000	10.000.000	100	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000	97.582.000	97,58	
PAUD	175.000.000	174.674.000	99,81	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	135.000.000	134.325.000	99,50	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2.816.250.000	2.771.850.000	98,42	
PAUD	15.052.943.600	14.093.783.476	93,63	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.057.690.000	4.042.890.000	99,64	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	971.890.000	957.090.000	98,48	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.085.800.000	3.085.800.000	100	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	175.001.500	168.933.646	96,53	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	175.001.500	168.933.646	96,53	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	64.999.760	62.746.746	96,53	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	65.002.000	63.119.800	97,10	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	03.002.000	00.119.000	51,10	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	44.999.740	43.067.100	95,71	
KEPENDIDIKAN	23.201.456.476	21.900.320.735	94,39	
Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan				
Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan	23.201.456.476	21.900.320.735	94,39	
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	10 406 501 000	0.515.600.406	01.06	
Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	10.426.501.888 12.774.954.588	9.515.680.486 12.384.640.249	91,26 96,94	
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.073.132.100	7.024.698.900	99,32	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	498.385.000	481.315.600	96,58	





URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	KETERANGAN
Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	275 005 000	250.016.000	05.46	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	375.885.000 253.570.000	358.816.000 253.566.000	95,46	
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	122.315.000	105.250.000	86,05	Adanya perbedaan standar harga pada saat perencanaan dengan laporan pertanggungjawaban pada rekening Perjalanan Dinas
Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.500.000	122.499.600	100	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	122.500.000	122.499.600	100	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.349.747.100	6.318.383.300	99,51	
Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	831.383.900	826.277.500	99,39	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	831.383.900	826.277.500	99,39	
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	83.870.200	83.870.200	100	
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	83.870.200	83.870.200	100	
Kegiataan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.434.493.000	5.408.235.600	99,52	
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	434.493.000	5.408.235.600	99,52	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan	225.000.000	225.000.000	100	
Organisasi Kepramukaan	225.000.000	225.000.000	100	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	225.000.000	225.000.000	100	

Sumber: Dindikpora Kabupaten Banjarnegara

Keterangan : Kolom keterangan merupakan alasan tidak terserapnya anggaran dengan persentase penyerapan anggaran kegiatan di bawah 90%





BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kepada semua elemen masyarakat yang pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menjadi pelaksanaan pendidikan selama (satu) tahun pembangunan 1 di Kabupaten Banjarnegara.

Sehubungan dengan kebijakan pokok perluasan dan pemerataan pendidikan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara menitik beratkan program-program dalam rangka penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik, serta penyempurnaan manajemen pendidikan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan.

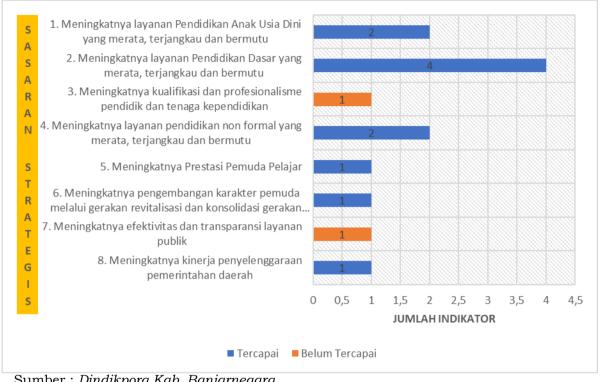
Capaian-capaian indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja 2022, memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan sekaligus mendukung terwujudnya misi-misi yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun keempat ini, merupakan modal dasar dalam penetapan perencanaan satu tahun kedepan, dan ketidaktercapaian indikator kinerja di Tahun 2022 menjadi evaluasi dalam penajaman program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di periode yang mendatang.

Pada Tahun 2022 pencapaian 13 indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terealisasi dengan baik, dengan rincian 11 indikator tercapai dan 2 indikator belum tercapai. Berikut ringkasan penjabaran pencapaian indikator kinerja sasaran strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2022 :





Grafik 10 Realisasi Indikator Kerja Utama (IKU) Berdasarkan Sasaran Strategis



Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja pendidikan di tahun mendatang, karena pandemi belum juga berakhir, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

- 1. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, terdistribusikannya sumbersumber belajar bagi semua siswa dan guru selama mereka harus melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
- 2. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh jenjang, dari PAUD, SD, SMP bahkan untuk Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
- 3. Mengadakan pelatihan-pelatihan / seminar yang dibutuhkan oleh para Pendidik, agar mereka lebih siap dalam merencanakan, mendesain, serta mengimplementasikan kegiatan pembelajaran secara daring / online yang berkualitas.
- 4. Koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan berbagai unsur seperti pendidikan, OPD terkait stake holder (Dinsos, Dindukcapil,





- Dinperindagkop), pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasayarakatan.
- 5. Pembukaan kelompok belajar (pokjar) di setiap desa untuk mendekatkan akses layanan pendidikan non formal.
- 6. Menjamin pelayanan pendidikan penduduk usia sekolah SD dan SMP dalam bentuk pemenuhan operasional siswa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- 7. Optimalisasi peran pendidikan non formal melalui layanan pendidikan kesetaraan.
- 8. Perluasan akses layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program kesetaraan untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendidikan non formal dengan sasaran Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) serta penduduk usia di atas 25 tahun yang belum mengenyam pendidikan.
- 9. Pendekatan akses pendidikan dengan penerapan model pembelajaran jarak jauh (fillial) dan kelompok belajar (pokjar), baik pendidikan formal maupun non formal.
- 10. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan dari daerah (BOPDA) untuk mendongkrak angka Anak Tidak Sekolah, diberikan kepada warga yang usia di atas 18 tahun, dan sedang menempuh pendidikan non formal / kesetaraan.
- 11. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikannya terutama pada pendidikan formal sehingga dapat terhindar dari putus sekolah.
- 12. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar yang ada.
- 13. Peningkatan kompetensi guru dan manajerial Kepala Sekolah.
- 14. Pemerataan distribusi guru pada semua wilayah kecamatan.
- 15. Pemetaan sekolah berdasarkan distribusi penduduk usia sekolah dan letak geografis sekolah.
- 16. Koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan stake holder pendidikan, tokoh masyarakat dan pemerintah desa / kecamatan sebagai upaya sosialisasi pendidikan kepada masyarakat.



Lineare Marin Vetters Received? Dive Perstation Person settles des Charries Tellus 1821



Program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi prioritas di tahun mendatang dalam meningkatkan kinerja pendidikan antara lain : pendampingan Bantuan Operaisonal Sekolah (BOS) / Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang PAUD/Dikmas, peningkatan kasilitasi bantuan sarana prasarana pendidikan, pelatihan peningkatan kompetensi guru, peningkatan kesra guru, optimalisasi pelaksanaan pendidikan non formal melalui program kesetaraan dan keaksaraan fungsional.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022, yang merupakan bahan evaluasi sekaligus sebagai pertanggungjawaban mandat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banjarnagara sesuai Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsinya serta dalam menjawab tantangan eru globalisasi dalam menyiapkan inaan pendidikan yang cerdas, bermutu dan berdaya saing sesuai dengan amanah yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga periode 2017-2022,

Dengan dukungan dari semua pihak, semoga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat menyelesaikan masalah pendidikan, serta dapat melaksanakan program pembangunan pendidikan dengan lebih efektif dan akuntabel, sehingga visi dan misi Kabupaten Banjamegara bisa tercapai,





PENYERAHAN TROPHY / KEJUARAAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH



<u>Keterangan</u>: Penyerahan Piala Penghargaan Juara 1 Lomba Fotografi kategori putra dalam rangka Jambore pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 atas nama **Akur Waiyan Pratama**



<u>Keterangan</u>: Penyerahan Piala Penghargaan Juara 2 Lomba Fotografi kategori putri dalam rangka Jambore pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 atas nama Tati' Faoziakh.



<u>Keterangan</u>: Penyerahan Piala Penghargaan Juara 2 Lomba Video Inovasi Pemuda kategori putra dalam rangka Jambore pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 atas nama Nando.



<u>Keterangan</u>: Penyerahan Piala Penghargaan Juara 3 Lomba Tari Daerah kategori Putri dalam rangka Jambore pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 atas nama Syafila Isna Firdayanti



<u>Keterangan</u>: Penyerahan Piala Penghargaan Juara 3 Lomba Tari Daerah kategori Putra dalam rangka Jambore pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 atas nama Afidian Sikta Firjayanto



<u>Keterangan</u>: Penyerahan Piala Penghargaan Juara umum Lomba Jambore pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 Kepada Kabupaten Banjarnegara



Penyerahan Medali Perak (juara 2) lomba Pencak Silat Putri POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah atas nama Fata Nur Almaida (MAN 2 Banjarnegara)



Penyerahan Medali Perak (Juara 2) lomba Pencak Silat Putri POPDA Tk Prov. Jateng a.n. Deswana Pratama Siwi (SMAN 1 Bawang)



Keterangan:

Penyerahan Medali Perunggu (Juara 3) lomba Atletik Putri POPDA Tk Prov, Jateng a.n Zahrina Amalia (MAN 2 Banjarnegara)



Keterangan:

Penyerahan Medali Perak (Juara 2) lomba Pencak Silat Putri POPDA Tk Prov. Jateng a.n. Deswana Pratama Siwi (SMAN 1 Bawang)



Penyerahan Medali Perak (juara 2) lomba Pencak Silat Putri POPDA Tk Prov. Jateng a.n. Fata Nur Almaida (MAN 2 Banjarnegara)



Penyerahan Medali Perunggu (Juara 3) lomba Atletik Putra POPDA Tk Prov. Jateng a.n.Rizko Febriano (SMKN 1 Bawang)



Penyerahan Medali Emas (Juara 1) lomba Panahan Putri POPDA Tk Prov. Jateng a.n.Nada Nuraini (SMK HKTI 1 Purwareja Klampok)



Penyerahan Medali Perak (Juara 2) lomba Renang Gaya Kupu-kupu Putra POPDA Tk Prov. Jateng a.n.Jevon Januar Tirta (SMAN 1 Bawang)



Penyerahan Medali Emas (Juara 1) lomba Renang Bebas Putra POPDA Tk Prov. Jateng a.n.Jevon Januar Tirta (SMAN 1 Bawang)



Penyerahan Medali Emas (Juara 1) lomba Tennes Lapangan Putri POPDA Tk Prov. Jateng a.n.Dinda Nurmayandha Sukma C (SMKN 1 Bawang)



Penyerahan Medali Emas (Juara 1) lomba Tennes Lapangan Putri POPDA Tk Prov. Jateng a.n.Dinda Nurmayandha Sukma C (SMKN 1 Bawang)



Penyerahan Medali Perunggu(Juara 3) lomba Sepak Takraw Putri POPDA Tk Prov. Jateng



Penyerahan Medali Perunggu(Juara 3) lomba Sepak Takraw Double Even Putri POPDA Tk Prov. Jateng (SMAN 1 Karangkobar)



Penyerahan Medali Perunggu(Juara 3) lomba Sepak Takraw Beregu Putri POPDA Tk Prov. Jateng (SMAN 1 Karangkobar)



Penyerahan

- 1.Medali (Juara 2) lomba Tarung Derajat Putri (52,1-55 Kg)POPDA Tk Prov. Jateng a.n Zaskia Anggun Sayekti (SMKN 1 Bawang)
- 2. Medali Perunggu (Juara 3) lomba Tarung Derajat Putra (57,1-61 Kg) POPDA Tk Prov. Jateng a.n Faiz Riyad Setya Nugraha (SMKN 1 Bawang), (61,1-65 Kg) a.n Gagah Bibit Akhiri (SMAN 1 Banjarnegara, (43,1-57 Kg) a.n Rendra Aji Syahputra (SMKN 1 Bawang).
- 3. Medali Perunggu (Juara 3) lomba Tarung Derajat Putri ($46,1-49~{\rm Kg}$) a.n Fidya Afita Rohmah
- 4. Medali Perunggu (Juara 3) lomba Tarung Derajat Ranger Putri a.n Eqk Anna Meylansa Puspita (SMKN 1 Bawang), Fidya Afita Rohma (SMAN 1 Bawang), Alifa Afita Romadhoni (MAN 2 Banjarnegara)



Juara 2 Menulis Aksara Jawa Putra (FTBI SD Tingkat Provinsi Tahun 2022)



Keterangan:

Juara 1 Kaligrafi Putra (MAPSI SD Tingkat Provinsi Tahun 2022)



Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tahun 2022

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP),
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ),
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2022
DAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2023
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

Telah diperiksa dan disetujui:

Sekretaris

NOVIYANTO KUSUMAWIJAYA, AP

NIP. 19751103/199412 1 001

Fungsional Perencana / Sub Koordinator Urusan PEP

YOGA SETIA, S.Sos.

NIP. 19750607 201001 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Dl. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. (0286) 594846 https://dindikpora.banjarnegarakab.go.id Email: dindikpora@banjarnegarakab.go.id BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR: 188.4/0039/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP), LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ), LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2022

DAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2023

PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

Menimbang: a.

- a. bahwa guna mendukung kelancaran dan keberhasilan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022, dan Perencanaan Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;



7. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 62 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 66);

 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

9. Nomor 7);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Tahun Anggaran 2022 dan Perencanaan Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

Tim tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

 Menghimpun dan mengumpulkan data dukung penyusunan LKJIP, LKPJ, LPPD Tahun Anggaran 2022 dan Perencanaan Tahun Anggaran 2023, atas kinerja dari masing-masing seksi/subag di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;

2. Menyusun LKJIP, LKPJ, LPPD Tahun Anggaran 2022 dan Perencanaan Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Mengirimkan Dokumen LKJIP, LKPJ dan LPPD kepada Pj. Bupati Banjarnegara;

4. Menyusun Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2023.

KETIGA

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, seluruh anggota Tim agar bersinergi dan berperan aktif dalam penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), LKPJ dan LPPD di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada Tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

EGÛH HANDOKO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

2. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara:

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;

4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara;

5. Yang bersangkutan.



Lampiran

: Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Nomor: 188.4/0039/2023 Tanggal: 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN LKJIP, LKPJ, LPPD TAHUN 2022 DAN PERENCANAAN TAHUN 2023 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Teguh Handoko, S.Sos.	Penanggungjawab	Kepala Dinas	
2.	Noviyanto Kusumawijaya, AP	Ketua	Sekretaris Dinas	
3.	Yoga Setia, S.Sos.	Sekretaris	Fungsional Perencana	- CHEMP
4.	Sunarto, S.Pd, M.Pd	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan PAUD	
			Dikmas	
5.	Heling Suhono, S.Pd.	Anggota	Kepala Bidang SD	
6.	Doko Harwanto, S.Pd. SE, MM.	Anggota	Kepala Bidang Sekmen	
7.	Sujadi, S.Pd, MM	Anggota	Kepala Bidang Pendidik	
70,77	3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	² Inggota	dan Tenaga	
			Kependidikan	
8.	Suhardi, S.Pd, MM	Anggota	Kepala Bidang	
	3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	Tinggotta	Kepemudaan dan	
			Olahraga	
9.	Heri Bowo Leksono, S.Pd, M.Pd	Anggota	Kepala Seksi Dikmas	
	1231 25 W 25 15 16, 171.1 U	ringgota	Bidang Pembinaan	
			PAUD Dikmas	
10.	Agus Mudianto, S.Pd.SD	Anggota	Kepala Seksi PAUD	
		7 mggota	Bidang Pembinaan	
			PAUD Dikmas	
	Suparto, S.Pd.	Anggota	Fungsional Pengembang	
11.		111980111	Kurikulum Ahli Muda	
			Bidang SD	
12.	Suwandi, S.Pd., M.Si	Anggota	Kepala Seksi Kesiswaan	
	***************************************		Bidang SD	
13.	Daryono, S.Sos.	Anggota	Kepala Seksi Sarana	
			Prasarana Bidang SD	
14.	Drs. Sukirno	Anggota	Kepala Seksi Sarana	
			Prasarana Bidang SMP	
15.	Rita Khotijah, S.Pd	Anggota	Kepala Seksi Kesiswaan	
			Bidang SMP	
16.	Suyadi, S.Pd	Anggota	Kepala Seksi Mutasi	
			Bidang Pendidik dan	
			Tenaga Kependidikan	
17.	Wasis Haryanto, S.Pd	Anggota	Fungsional Analis	
			Kepegawaian Ahli Muda	
			Bidang Pendidik dan	
			Tenaga Kependidikan	



NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KET.
18.	Supriyadi, S.Pd	Anggota	Kepala Seksi	
			Pengembangan Bidang	
			Pendidik dan Tenaga	
			Kependidikan	
19.	Tanti Pratiwi, S.Pd	Anggota	Staf Seksi Olahraga	
			Bidang Kepemudaan dan	
	2/200 3 (1)85 3 200		Olahraga	
20.	Fadzilah, SE	Anggota	Staf Seksi Kepemudaan	
			Bidang Kepemudaan dan	
			Olaraga	
21.	Sri Mai Hastuti, SE	Anggota	Kepala Sub Bagian	
			Umum dan Kepegawaian	
22.	Asminah, S.AP	Anggota	Bendahara Pengeluaran	
23.	Riani, S.Kom.	Anggota	Staf Sub Bagian PEP	
24.	Dra. Sri Rejeki	Anggota	Staf Sub Bagian PEP	
25.	Sobirin	Anggota	Staf Sub Bagian PEP	
26.	Umar Mahsum	Anggota	Staf Sub Bagian PEP	
27.	Eka Febriyanti, S.Pd.	Anggota	Staf Sub Bagian PEP	
28.	Malinda Anting	Anggota	Staf Sub Bagian PEP	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

TEGUH HANDOKO

